



**PERAN ISEI MEMPERKUAT SINERGI UNTUK
MENJAGA STABILITAS DAN MENDORONG
MOMENTUM PEMULIHAN EKONOMI
YANG INKLUSIF DI ERA DIGITAL**

**PROSIDING
SIDANG PLENO ISEI XXII & SEMINAR NASIONAL 2022
Semarang, 24 Agustus 2022**

**PERAN ISEI MEMPERKUAT SINERGI UNTUK MENJAGA
STABILITAS DAN MENDORONG MOMENTUM PEMULIHAN
EKONOMI YANG INKLUSIF DI ERA DIGITAL**

**PROSIDING
SIDANG PLENO ISEI XXII & SEMINAR NASIONAL 2022**

Semarang, 24 Agustus 2022



**PENERBIT
PENGURUS PUSAT IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA**

**PERAN ISEI MEMPERKUAT SINERGI UNTUK MENJAGA
STABILITAS DAN MENDORONG MOMENTUM PEMULIHAN
EKONOMI YANG INKLUSIF DI ERA DIGITAL**

**PROSIDING
SIDANG PLENO ISEI XXII & SEMINAR NASIONAL 2022**

Semarang, 24 Agustus 2022

PENASIHAT Perry Warjiyo, Halim Alamsyah

PANITIA PENGARAH (STEERING COMMITTEE/SC) Solikin M. Juhro,
Anggito Abimanyu, Dody Budi Waluyo, Ari Kuncoro, M. Edhie Purnawan

PANITIA PELAKSANA (ORGANIZING COMMITTEE/OC) Anggito Abimanyu,
Arl yana Abubakar, Candra Fajri Ananda, Hermanto Siregar, Taufan E.N. Rotorasiko,
Eko B. Supriyanto

BENDAHARA & PENDANAAN Sunarso, Royke Tumilaar, Jahja Setiaatmadja,
Alexandra W. Askandar, Haru Koesmahargyo, Hery Gunardi, Lisawati

BIDANG SIDANG PLENO Arlyana Abubakar, Suharnomo, Eko Purwanto, Sultan Suhab,
Retno Agustina Ekawati

BIDANG LAPORAN KEGIATAN Ayi Ahadiyat, Indriayu Afriana, Aditya Febriansyah,
Widuri Meintari, Alwiyah Mahdaly

BIDANG KAJIAN TERAPAN Amalia Adininggar Widyasanti, Wasiaturahma,
Nasruddin Djoko, Akbar Suwardi, Bayu Purnomo, Satrio Dwicahyo

BIDANG WEBINAR NASIONAL/REKOMENDASI KE PEMERINTAH Yoga Affandi,
Vid Adrison, Dimas Yuliharto, Vivi Alatas, Asep Mulyana, Danang R Ginanjar,
Ferry Preska Wathan

BIDANG CALL FOR PAPERS JEI Kiki Verico, Achmad Suryana, Aldrin Herwany,
Amalia Adininggar Widyasanti, Christantius Dwiatmadja, Devanto Pratomo,
Eny Sulistyaningrum, Iman Gunadi, Jaka Sriyana, Mohammad D. Revindo,
Muhammad Firdaus, Shanty Oktavilia, Teguh Dartanto, Yohanes B. Kadarusman,
Zamroni Salim

RAPPORTEUR SEMINAR NASIONAL Yus Sri Susilo, Yohanes B Kadarusman,
Wardhana, MHA Ridhwan, Arief Budi Laksono

ACARA DAN SISTEM PENDUKUNG Anika Faisal, Lely Pelitasari Soebekty,
Idah Rosidah, Umran Usman, Kristin Endah C., Himawan

HUMAS & PUBLIKASI Junanto Hedriawan, Tomi Aryanto, Brigita Manohara

Editor Solikin M. Juhro & Firman Sihol Parningotan

PENERBIT

Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia

REDAKSI

Jl. Daksa IV /9 Kebayoran Baru Jakarta 12110

Email: isei.pusat@gmail.com

ISBN

Cetakan Pertama 2022

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun

**PERAN ISEI MEMPERKUAT SINERGI UNTUK MENJAGA
STABILITAS DAN MENDORONG MOMENTUM PEMULIHAN
EKONOMI YANG INKLUSIF DI ERA DIGITAL**

**PROSIDING
SIDANG PLENO ISEI XXII & SEMINAR NASIONAL 2022**

Semarang, 24 Agustus 2022

DAFTAR ISI

PENGANTAR KETUA PANITIA PENGARAH Solikin M. Juhro – Sekretaris Umum	IX
LAPORAN KETUA PANITIA PELAKSANA PUSAT Anggito Abimanyu – Ketua Bidang Organisasi	XIII
SAMBUTAN KETUA ISEI CABANG SEMARANG Suharnomo	XVII
SAMBUTAN GUBERNUR JAWA TENGAH Ganjar Pranowo	XXI
SAMBUTAN KETUA UMUM PENGURUS PUSAT ISEI Perry Warjiyo	XXV
ARAHAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA K. H. Ma'ruf Amin	XXXI
RINGKASAN EKSEKUTIF PAPARAN NARASUMBER SEMINAR NASIONAL Mahendra Siregar – Ketua Dewan Komisioner OJK Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan M. Rudy Salahudin – Deputy IV Kemenko Bidang Perekonomian M. Arsyad Rasjid P.M. – Ketua Umum KADIN Ardella Apti – CEO Mapan	XXXV
<i>POLICY RECOMMENDATION ISEI</i> Dody B. Waluyo – Ketua Bidang Kajian & Rekomendasi Kebijakan PP ISEI	XLIII

ABSTRAK ARTIKEL PEMENANG <i>CALL FOR PAPERS JEI</i>	1
GLOBALISASI DAN TANTANGANNYA	3
<i>SCRUTINIZING THE FOREIGN DIRECT INVESTMENT SPILLOVERS MODEL: DO FOREIGN FIRMS MOTIVATE LOCAL FIRMS TO EXPORT?</i> Mohammad Zeqi Yasin & Rudi Purwono	5
MODEL <i>HYBRID</i> DALAM PENENTUAN NILAI TUKAR RUPIAH: PENDEKATAN MIKROSTRUKTUR DAN MAKROEKONOMI Fitri Handayani	7
<i>SHOULD INDONESIA IMPORTS CHICKEN FROM BRAZIL?</i> Catur Sugiyanto & Pepti Maya	9
TEKNOLOGI, PEREKONOMIAN, DAN INKLUSI KEUANGAN DALAM PEMULIHAN EKONOMI DARI PANDEMI DI JAWA-BALI Dede Yoga Paramartha & Dewi Widyawati	11
<i>FREIGHT SERVICE DEFICIT AND CHALLENGES OF THE SHIPPING INDUSTRY IN INDONESIA</i> Salman Samir, Achmad Rifai & Rizky Utami	13
MONETER, FINTECH DAN <i>DIGITAL ECONOMY</i>	15
DETERMINAN WIRAUSAHA PEREMPUAN PENGGUNA TRANSAKSI DIGITAL SELAMA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA Dien Amalina Nur Asrofi, Devanto Shasta Pratomo & Farah Wulandari Pangestuty	17
PENGARUH DIGITALISASI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA PEREMPUAN INDONESIA Ifan Davani & Eny Sulistyaningrum	19

<i>EFFICIENCY, PERFORMANCE AND POTENTIAL IMPROVEMENT OF INDONESIAN RURAL BANKS DURING COVID-19 PANDEMIC</i>	21
Aam Slamet Rusydiana, Mimma Maripatul Uula, Syahdatul Maulida, Aufa & Raihan Agra Dharana Kanz	
<i>THE STRENGTH OF THE SEEMINGLY UNRELATED REGRESSION MODEL IN DETECTING ECONOMIC GROWTH AND POVERTY RATE BASED ON FINANCIAL INCLUSION IN INDONESIA</i>	23
Lia Nazliana Nasution, Ade Novalina & Budi Anshari Nasution	
DAMPAK SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI TERHADAP PEREKONOMIAN DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN INDONESIA	25
Muhammad Adisurya Pratama & Muhammad Handry Imansyah	
FISKAL, MULTIPLIER DAN SUSTAINABILITY	27
<i>TOURISM MODEL IN INCREASING LOCAL OWN REVENUE: TERNATE CITY CASE STUDY</i>	29
Prince Charles Heston Runtunuwu, Nurdin Ardiansyah & Bakri Soamole	
<i>THE RELATIONSHIP OF ORGANIZING NATIONAL SPORTS EVENTS TO LOCAL TAX REVENUE IN INDONESIA</i>	31
Susan Budiarto & Riatu Mariatul Qibtiyyah	
PENGARUH KARTU PRAKERJA DALAM MENCIPTAKAN WIRUSAHA BARU PADA GENERASI Y DAN Z	33
Tasmilah	
ANALISIS GREEN FINANCING DAN FAKTOR SPESIFIK BANK TERHADAP RISIKO PERBANKAN DI INDONESIA	35
Felix Alvin Hatmadi & Nuning Trihadmini	
DAMPAK MULTIPLIER SEKTOR UNGGULAN JATIM TERHADAP PROVINSI LAIN: PENDEKATAN IRIO	37
Dwi Wahyu Triscowati & Taupikurrahman	
PRODUKTIFITAS DAN DAYA SAING	39

<i>FOR POOR HOUSEHOLDS, SOCIAL CAPITAL IS IMPORTANT TO DEAL WITH DISASTERS</i>	41
Thomas Soseco. Isnawati Hidayah, Nila Cahayati & Fajar Try Leksono	
<i>GEN Z DAN TRANSISI PEKERJA BLUE-COLLAR: TANTANGAN DALAM PEMULIHAN EKONOMI</i>	43
FX Gugus Febri Putranto & Christiayu Natalia	
<i>BONUS DEMOGRAFI, MODAL MANUSIA, DIGITALISASI, DAN KESEJAHTERAAN: SEBUAH KAJIAN EMPIRIS</i>	45
Nadya Setiawati & Iqram Ramadhan Jamil	
<i>YOUTH NEET IN EAST JAVA AMIDST THE COVID-19 PANDEMIC</i>	47
Yefin Amandri Meidika, Yusi Krismaningtyas & Taly Purwa	
<i>AGEING POPULATION DAN DETERMINAN KEPUTUSAN BEKERJA PENDUDUK LANJUT USIA DI INDONESIA</i>	49
Ida Ayu Wayan Regita Iswari Puri & A.A. Ngurah Gede Wasudewa	
FOTO-FOTO	A



PENGANTAR PANITIA PENGARAH

Pada Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ke XXI tahun lalu, Ketua Umum ISEI menyampaikan bahwa ISEI dan pemangku kepentingan harus mampu menjawab 3 (tiga) tantangan berat perekonomian. *Pertama*, terus menjaga resiliensi perekonomian domestik ditengah kondisi ekonomi dan keuangan global yang sedang berada dalam tekanan berat akibat pandemi Covid-19 dan memanasnya geopolitik. *Kedua*, terus memperkuat sinergi/upaya bersama untuk memulihkan ekonomi nasional, keluar dari permasalahan pandemi Covid-19. *Ketiga*, harus mampu mempersiapkan dan memaksimalkan peluang dari perkembangan inovasi dan ekonomi serta keuangan digital bagi kemajuan ekonomi negeri ini.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, ISEI perlu memperkuat peran strategis ke depan. Penguatan dilakukan melalui 4 (empat) strategi pokok yang dijabarkan ke dalam program-program konkret. *Pertama*, penguatan sinergi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. *Kedua*, penguatan strategi untuk mendorong inovasi dan kontribusi untuk mempercepat implementasi kebijakan reformasi struktural dalam mencapai Indonesia maju di tahun 2045. *Ketiga*, perluasan inovasi dan percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, serta bidang-bidang lain (khususnya pendidikan, kesehatan, dan sosial) secara menyeluruh. *Keempat*, optimalisasi pelaksanaan program-program pemberdayaan (*empowerment*) Pengurus ISEI Pusat dan Daerah.

Mengusung semangat tersebut, Seminar Nasional Tahun 2022 mengangkat tema “Peran ISEI Memperkuat Sinergi untuk Menjaga Stabilitas dan Mendorong Momentum Pemulihan Ekonomi yang Inklusif di Era Digital”. Tema ini memperhatikan kesinambungan dengan tema dan hasil semi-

nar tahun-tahun sebelumnya, khususnya sejak 2018, serta sejalan dengan momentum strategis Indonesia yang memegang Presidensi G20 Tahun 2022 dengan tema *“Recover Together, Recover Stronger”*. Secara spesifik, keenam Agenda Prioritas Presidensi G20 Jalur Keuangan (*Finance Track*) senafas dengan tema Seminar Nasional ISEI 2022, yakni: (1) *Exit strategy to support recovery*; (2) *Addressing scarring effect to secure future growth*; (3) *Payment systems in digital era*; (4) *Sustainable finance*; (5) *Digital financial inclusion*; dan (6) *International taxation*.

Tema besar dimaksud dijabarkan ke dalam 3 (tiga) subtema Seminar Nasional. *Pertama*, subtema *“Memperkuat Sinergi untuk Menjaga Stabilitas”*. Subtema ini menekankan pada pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan, yakni: Pemerintah dan otoritas terkait, dunia usaha (industri/bisnis), akademisi dan para pakar/ahli, serta masyarakat luas, untuk memperkuat stabilitas perekonomian (makroekonomi dan sistem keuangan), politik, dan sosial, menghadapi meningkatnya tekanan dan ketidakpastian global akibat pandemi Covid-19 dan memanasnya kondisi geopolitik. Normalisasi kebijakan di berbagai negara maju, fenomena stagflasi akibat kebijakan *quantitative easing* sebagai upaya mengatasi dampak pandemi, dan melonjaknya *public & commercial debts* di beberapa negara berkembang yang bahkan menyebabkan *social unrest* di beberapa negara, meningkatkan risiko dampak rembetan ke perekonomian domestik. Sinergi kebijakan untuk menjaga stabilitas menjadi kunci untuk menjaga perekonomian Indonesia.

Kedua, subtema *“Memperkuat Sinergi untuk Mendorong Momentum Pemulihan Ekonomi”*. Subtema ini menekankan pada perlunya terus mencari sumber-sumber pertumbuhan baru, menciptakan lapangan kerja, dan memajukan UMKM untuk mendorong produktivitas serta mempercepat pemulihan ekonomi. Pada konteks Agenda Prioritas Presidensi G20 Jalur Keuangan, unsur ini senada dengan agenda prioritas *“addressing scarring effect to secure future growth”* dan *“exit strategy to support recovery”*. Upaya ini dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan sinergi ISEI dengan berbagai pemangku kepentingan.

Ketiga, subtema “*Inovasi dan Digitalisasi untuk Ekonomi Inklusif*”. Subtema ini menjadi sangat relevan dimana inovasi digital di berbagai bidang berkembang pesat, khususnya di tengah pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir. Di sisi lain, kebijakan ekonomi dan keuangan hijau (*sustainable economy and finance*) juga merupakan bagian dari unsur ini. Dalam hal ini, peran ISEI sebagai mitra pemerintah perlu terus didorong untuk mempercepat transformasi digital dan hijau di bidang ekonomi dan keuangan. Pada konteks Presidensi G20, subtema ini mendukung agenda “*payment systems in digital era*”, “*digital financial inclusion*”, serta “*sustainable finance*”.

Dengan demikian penetapan tema Sidang Pleno ISEI XXII dan Seminar Nasional tahun 2022 sebagaimana disampaikan sebelumnya, yaitu: “*Peran ISEI Memperkuat Sinergi untuk Menavigasi Era Digital dan Mengakselerasi Momentum Pemulihan Ekonomi yang Berkelanjutan*” menjadi penting dan relevan. Besar harapan pelaksanaan Sidang Pleno ini dapat merumuskan suatu perspektif pemikiran dan rekomendasi kebijakan ekonomi ISEI, yang merupakan kontribusi bersama Pengurus Pusat ISEI dan Pengurus Cabang ISEI di seluruh Indonesia, yang akan disampaikan sebagai masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Semarang, 24 Agustus 2022

Dr. Solikin M. Juhro

Ketua Panitia Pengarah & Sekretaris Umum PP ISEI



SAMBUTAN KETUA PANITIA PELAKSANA PUSAT

Indonesia sudah 77 tahun merdeka dan telah menghasilkan jutaan ekonom di berbagai lahan mengabdikan, di dunia akademik, industri, sektor keuangan, pemerintahan, partai politik dan ormas. 67 tahun yang lalu organisasi ISEI berdiri, tepat 10 tahun setelah Indonesia Merdeka. Sejak itu, ISEI sebagai organisasi keserjanaan terus eksis dalam tanggung jawab ekonomi nasional dan global. Betapa besar kontribusi para sarjana ekonomi hingga saat ini bagi pembangunan di Indonesia. Saat ini telah lebih dari 3.500 prodi EMBA terus menghasilkan banyak calon pemimpin bangsa di berbagai bidang. ISEI telah memprakasai pendirian LAMEMBA untuk memberikan akreditasi bagi program studi tersebut agar dapat ditingkatkan mutu dan kualitasnya. Sidang pleno ISEI yang ke-22 diikuti oleh 52 Cabang di seluruh Indonesia. Tiga tahun sudah, sidang dan kongres ISEI dilaksanakan secara daring. Alhamdulillah, Rabu, 24 Agustus hingga Sabtu 26 Agustus 2022, ISEI melaksanakan pertemuan secara fisik di kota Semarang.

Semarang dijuluki Kota Lumpia karena lumpia merupakan makanan khas Semarang. Lumpia merupakan akulturasi dua budaya yaitu budaya Jawa dan China. Kota Semarang bersemboyankan ATLAS. Atlas merupakan singkatan dari aman, tertib, lancar, asri, dan sehat. Julukan ini gencar disebut pada zaman kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah, Muhammad Ismail. Semboyan ini bermaksud mengajak warga Semarang agar merawat kota lebih baik lagi dan aman dari banjir

Kekuatan organisasi ISEI terletak pada jumlah anggota, jaringan ABG (Akademisi, Bisnis dan *Government*) dan sinergi yang dibangun kuat sejak awal berdirinya, dan tak kalah penting dukungan dari para istri dan

keluarga. Pengurus ISEI saat ini berusaha keras untuk menghubungkan anggota satu sama lain melalui kartu anggota elektronik. Sejak dua tahun yang lalu telah dilakukan inisiatif pendataan anggota. Saat ini database keanggotaan ISEI telah menjangkau hampir 5.700 anggota ISEI. Portal keanggotaan ini juga telah terhubung dengan *payment gateway* yang mempermudah proses aktivasi anggota. Para Anggota yang telah memiliki kartu anggota virtual yang ke depan dapat dikerjasamakan dengan berbagai *merchant* melalui sistem *QR code*.

Sidang Pleno ISEI XXII & Seminar Nasional 2022 mengambil tema "*Peran ISEI Memperkuat Sinergi untuk Menjaga Stabilitas dan Mendorong Momentum Pemulihan Ekonomi yang Inklusif di Era Digital*". Kegiatan Perkumpulan Istri atau PI ISEI juga akan berjalan secara simultan dengan Sidang Pleno ISEI. Hari ini juga telah hadir para ibu-ibu pengurus dan anggota PI ISEI dari 24 cabang di Indonesia dan memulai acara hari ini dengan tema: "*Dampak Pandemi Covid 19 Kita Jadikan Momentum untuk peningkatan Ekonomi Keluarga*" dengan fokus kegiatan organisasi, bakti sosial dan *sharing*, dan yang lebih hebat adalah *soft launching remix mars* dan *hymne PI-ISEI*.

Sidang pleno kali ini menampilkan beberapa kegiatan strategis dan penting, *Pertama*, akan disampaikan rekomendasi kebijakan ISEI kepada pemerintah dengan judul "*Memperkuat Sinergi untuk Menjaga Stabilitas dan Mendorong Momentum Pemulihan Ekonomi yang Inklusif di Era Digital*" untuk mengingatkan kita semua pentingnya sinergi tujuan, sinergi kebijakan, sinergi pelaku, dan sinergi langkah dalam pemulihan ekonomi. *Kedua*, Kegiatan Seminar Nasional ISEI kali ini akan mengambil tiga sub tema yaitu: pertama, Menjaga Stabilitas di Tengah Meningkatnya Tekanan & Ketidakpastian Global, kedua, Sinergi Mendorong Momentum Pemulihan Ekonomi dan ketiga, Inovasi & Digitalisasi untuk Pemulihan Ekonomi yang Inklusif, dengan narasumber dari pengambil kebijakan dan pelaku ekonomi digital untuk mengkaji perannya bagi pemulihan perekonomian nasional. Ketiga, penyampaian hasil kajian terapan cabang yang tahun ini kita lakukan dengan cara berbeda/ yaitu

dengan membuat INDIKATOR SURVEI EKONOMI INDONESIA atau disingkat dengan ISEI INDEX. Jumlah responden survei secara nasional tercatat mencapai 3.472 anggota ISEI dan merangkum kesimpulan sbb: pertama, ekspektasi kondisi perekonomian nasional dan daerah akan membaik dalam 3 bulan ke depan dengan indeks 1,7 dari kisaran optimis 1 dan pesimis 3. Namun tantangan kondisi perekonomian makro tetap ditandai dengan adanya tekanan inflasi, kenaikan suku bunga dan volatilitas kurs rupiah. Survei ini dapat dikatakan memenuhi kaidah obyektivitas karena sebagai responden mayoritas adalah ekonom akademisi yang mengetahui persis denyut nadi perekonomian di daerahnya masing-masing. Keempat, terakhir ISEI juga melaksanakan *call for papers* untuk Jurnal Ekonomi Indonesia. Telah terpilih 20 papers yang akan dipresentasikan pada rangkaian Sidang pleno ini. Saat ini Jurnal Ekonomi Indonesia menjadi lebih menarik para peneliti setelah mendapatkan status akreditasi SINTA per Desember tahun lalu. Kami menerima 150 *papers* pada *call for papers* kali ini. Angka ini lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kami berharap akan semakin banyak peneliti muda ISEI bertalenta dari berbagai daerah yang akan mempresentasikan karya ilmiahnya dan terpublikasi secara global.

Kekuatan ISEI adalah pada anggota ISEI yang tersebar. Anggota ISEI telah berada di seluruh propinsi di Indonesia dan di beberapa belahan dunia. Jadi kemanapun Bapak Ibu menginjakkan kaki di bumi Nusantara atau berkunjung ke berbagai negara dunia, akan ditemui anggota ISEI yang siap mengabdikan dan memberikan sumbangsih untuk Negara!! Kami haturkan Terima kasih kepada yth bapak Wakil Bapak Presiden RI yang memberikan pengarahan. Terima kasih pula atas kesediaan bapak Gubernur Jawa Tengah memberikan sambutan sebagai tuan rumah Sidang Pleno ke 22. Tak lupa kepada kepada seluruh pembicara, SC dan OC Sidang Pleno serta panitia lokal ISEI Semarang yang dipimpin Prof Suharnomo, dan seluruh sponsor acara, kami ucapkan terima kasih atas upayanya mensukseskan pelaksanaan Sidang Pleno ke XXII di Semarang. Sebagai penutup kami mengajak kita semua para anggota ISEI mari bersama-sama kita tingkatkan peran ISEI dalam pemulihan

ekonomi melalui Sidang Pleno ISEI ke 22 dan Seminar Nasional 2022 di Semarang.

Semarang, 24 Agustus 2022

Dr. Anggito Abimanyu

Ketua Panitia Pelaksana & Ketua Bidang Organisasi



SAMBUTAN KETUA ISEI CABANG SEMARANG

Puji dan syukur saya haturkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala keberkahan dan hidayah-Nya sehingga Sidang Pleno ISEI XXII & Seminar Nasional 2022 dapat terlaksana dengan baik. Perjalanan penyelenggaraan kegiatan ini sarat dengan tantangan, namun dengan kerjasama yang baik dan solid dari seluruh panitia pelaksana, bantuan pihak-pihak terkait serta pertolongan Yang Maha Kuasa, akhirnya semua tantangan dapat teratasi.

Saya selaku Ketua ISEI Cabang Semarang sekaligus Ketua Panitia mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pengurus Pusat ISEI beserta para Ketua Cabang ISEI se Indonesia yang telah memberi kepercayaan dan dukungan kepada Semarang untuk menjadi Tuan Rumah Sidang Pleno ISEI XXII & Seminar Nasional 2022.
2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya atas kolaborasi yang apik sejak awal hingga terselenggaranya kegiatan.
3. Seluruh instansi dan perusahaan yang telah berkenan pendukung utama ISEI Semarang dalam penyelenggaraan kegiatan ini, antara lain Otoritas Jasa Keuangan, Bank Jateng, PT Pegadaian, PT Polytama Propindo, Bank Central Asia, BPR Agung Sejahtera, Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, PT BPR BKK Jateng, Jamkrida Jateng, PR Sukun
4. Seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi dan Fakultas yang telah ber-

partisipasi sebagai *Co-Host* dalam penyelenggaraan kegiatan ini, antara lain UNDIP, UNISBANK, UNAKI, UDINUS, STIE SEMARANG, UNNES, UNIKA SOEGIJAPRANATA, UPGRIS, STIE BANK JATENG, UMK, POLINES, UNISSULA. STIE TOTALWIN, UNWAHAS, UNTI-DAR

5. Seluruh pengisi acara yang telah meluangkan waktu sehingga kegiatan berjalan lancar.

Tema Sidang Pleno ke XXII dan Seminar Nasional 2022 adalah: “*Peran ISEI Memperkuat Sinergi untuk Menjaga Stabilitas dan Mendorong Momentum Pemulihan Ekonomi yang Inklusif di Era Digital*”. Dalam Sidang Pleno kali ini diharapkan Pengurus Pusat ISEI dan Pengurus Cabang ISEI di seluruh Indonesia, secara bersama dapat merumuskan suatu “perspektif pemikiran dan rekomendasi kebijakan ekonomi ISEI” yang akan disampaikan sebagai masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kegiatan Sidang Pleno ke XXII dan Seminar Nasional 2022 terdiri dari serangkaian acara yang diselenggarakan selama 3 (tiga) hari yaitu:

1. Rabu, 24 Agustus 2022 diawali dengan Pembukaan dan Seminar Nasional di pagi hari yang kemudian di siang hari dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan sekaligus yaitu 1) Sidang Pleno yang diikuti oleh PPISEI, Ketua Cabang dan Pendamping; 2) *Call for Paper* Jurnal Ekonomi Indonesia; serta 3) Seminar Bisnis Daerah. Kegiatan hari pertama ditutup dengan *Gala Dinner* yang diselenggarakan di Lawang Sewu.
2. Kamis, 25 Agustus 2022 bersama BI Institute diselenggarakan *Bulletin Monetary Economics and Banking (BMEB) International Conference* pada pagi hari dan dilanjutkan dengan *BMEB Call for Paper*.
3. Jum’at, 26 Agustus 2022 melanjutkan rangkaian kegiatan BMEB dengan *BMEB Lecture* dan *BMEB Research Workshop*. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan Semarang *City Tour* mengelilingi Kota Semarang dengan Bus Wisata Denok Kenang.

Terakhir, dan yang tidak kalah penting, ini semua tentu tidak dapat berjalan lancar tanpa kerja keras Panitia ISEI Semarang serta dukungan Panitia Pusat ISEI dan dibantu oleh tim mahasiswa (UNDIP, UNIS-BANK, UNAKI, UPGRIS, STIE Bank Jateng, UNISSULA) yang tanpa lelah mempersiapkan semua hal terbaik untuk seluruh peserta kegiatan. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang saya tidak dapat sebutkan satu per satu. Semoga Sidang Pleno ISEI XXII & Seminar Nasional 2022 ini dapat memberikan manfaat. Kami juga menghaturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika ada salah kata dan laku kami serta kekurangan atas penyelenggaraan Sidang Pleno ISEI XXII & Seminar Nasional 2022 ini.

Besar harapan kami, kita dianugerahi kesehatan dan panjang umur sehingga dapat berjumpa pada Sidang Pleno ISEI XXIII & Seminar Nasional 2023 di Bengkulu. ISEI semakin hebat, Indonesia lebih kuat.

Semarang, 24 Agustus 2022

Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.

Ketua ISEI Cabang Semarang / Ketua Panitia ISEI Semarang



SAMBUTAN GUBERNUR JAWA TENGAH

Tahun 2022 ini menjadi sebuah titik cerah permasalahan pandemi yang telah melanda Indonesia sejak 2020. Pandemi covid-19 mulai terkendali, kesehatan masyarakat sudah mulai pulih walaupun kita harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan ekonomi masyarakat mulai bergerak. Perekonomian mulai bangkit kembali. Pengendalian melalui vaksinasi dan *booster* adalah kunci yang sangat menentukan agar masyarakat bisa bekerja kembali, anak-anak kita bisa belajar di sekolah lagi, dan kita bisa kembali beribadah di rumah ibadah dengan tenang. Seiring dengan hal tersebut, juga agar perekonomian nasional kita bisa segera bangkit seperti sebelum pandemi.

Pandemi telah mengubah perilaku masyarakat menjadi *less contact economy*, banyak melakukan kegiatan di rumah, belanja kebutuhan secara daring. Selama pandemi ini, transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap tumbuh dikarenakan meningkatnya preferensi masyarakat berbelanja daring, adanya kemudahan sistem pembayaran digital dan akses perbankan digital.

Tahun 2022 juga membangkitkan optimisme, memberikan keyakinan, kepercayaan yang lebih besar pada masyarakat dan para pelaku usaha untuk segera melanjutkan aktivitas ekonomi dan aktivitas-aktivitas produktif lainnya. Bagi Jawa Tengah, program pemulihan ekonomi menjadi prioritas dalam menghadapi kontraksi akibat pandemi covid-19. Ekonomi Jawa Tengah tumbuh positif pada Triwulan II-2022 (y-on-y) sebesar 5,66 persen atau tumbuh 1,47 persen (Q to Q). Pemprov Jateng juga berhasil mengendalikan tingkat inflasi di tengah tingginya tingkat inflasi global, antara lain dengan menyediakan infrastruktur pendukung

logistik dan memastikan ketersediaan bahan pokok di wilayah Jateng, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Jumlah penduduk miskin juga menurun di angka 10,93 persen (3,83 juta orang) pada bulan Maret 2022, atau turun 0,32 persen (102,6 ribu orang) dibanding September 2021.

Pada sisi percepatan pemulihan di sektor koperasi dan UMKM pasca pandemi, Pemprov Jawa Tengah telah melakukan pendampingan UMKM, transformasi digital, business and network fair UMKM, peningkatan kualitas produksi UMKM, serta pengembangan desain produk kemasan. Berbagai inovasi untuk membangkitkan UMKM telah dilakukan, diantaranya program Jogo Tonggo, UMKM Bangkit, pemasaran on line Lapak Ganjar, pengembangan sistem pembayaran QRIS untuk UMKM, pengembangan platform digital oleh UMKM, kampus UMKM Shopee. Konsep ekonomi inklusif dimana tidak ada seorangpun yang tertinggal (*no one left behind*) merupakan konsep yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Di era digital ini, wajib mengikutsertakan semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Ketersediaan infrastruktur digital harus bisa diakses oleh seluruh masyarakat.

Kehadiran ISEI memiliki peran penting dalam mendukung akselerasi pemulihan ekonomi di era digital, khususnya dalam mengantisipasi kompleksitas model bisnis serta resiko ekonomi dan keuangan di era digital. Saya sangat mengapresiasi ISEI yang telah menyumbang hasil pemikiran dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Saya berharap, ISEI dapat terus memperkuat sinergi antara berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, maupun pelaku bisnis dalam mendorong sumber pertumbuhan ekonomi, mendorong digitalisasi, serta ekonomi keuangan inklusif.

Semoga kolaborasi dan sinergitas tersebut dapat menghasilkan pemikiran atau gagasan-gagasan segar yang akan membawa kemajuan perekonomian Indonesia tanpa ada sekelompok masyarakat pun yang terabaikan.

Semarang, 24 Agustus 2022

H. Ganjar Pranowo, S.H., M.IP.
Gubernur Jawa Tengah



SAMBUTAN KETUA UMUM PENGURUS PUSAT ISEI

ISEI berkomitmen terus bersinergi dengan pemerintah untuk memperkuat ekonomi Indonesia, serta mendorong pemulihan ekonomi Indonesia, sesuai dengan Tema HUT RI ke-77 tahun 2022 “*Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat*”. Terdapat 3 (tiga) aspek penting yang perlu menjadi perhatian, yaitu :

- a. Perkembangan ekonomi global diwarnai dengan meningkatnya risiko stagflasi.
 - Ekonomi global lebih rendah dari prakiraan di berbagai negara dan bahkan resesi di sejumlah negara maju sebagai dampak dari pengetatan kebijakan moneter yang agresif.
 - Tekanan inflasi global masih tinggi seiring dengan ketegangan geopolitik dan kebijakan proteksionisme yang masih berlangsung, serta perbaikan gangguan rantai pasokan yang masih terbatas.
 - Ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi, di tengah masih berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara, termasuk AS meskipun tidak seagresif dari prakiraan awal.

- b. Megatren digitalisasi
 - Transaksi ekonomi dan keuangan digital mengalami kenaikan ditopang oleh meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi *digital banking*.
 - Nilai transaksi uang elektronik (UE) pada Juli 2022 tumbuh 39,76% (yoy) mencapai Rp35,5 triliun dan nilai transaksi *digital banking* meningkat 27,82% (yoy) menjadi Rp4.359,7 triliun sejalan dengan normalisasi mobilitas masyarakat.
 - Nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit mengalami peningkatan 34,87% (yoy) menjadi Rp739,4 triliun.

- c. Tuntutan Ekonomi dan keuangan hijau, sesuai dengan agenda prioritas Presidensi Indonesia di G20.

Dalam rangkaian pembukaan Sidang Pleno ISEI XXII – Seminar Nasional 2022, wakil presiden RI, Ma’ruf Amin, memberikan 3 (tiga) arahan untuk penguatan sinergi menjaga stabilitas dan pemulihan ekonomi Indonesia, yaitu :

- a. Sinergi untuk menjaga *supply* dan rantai pokok kebutuhan pokok. Ketersediaan bahan pokok khususnya pangan sangat penting dan harus dipastikan, sehingga tidak memunculkan gangguan pasokan.
- b. Sinergi dalam perumusan kebijakan fiskal dan moneter yang efektif. Perumusan kebijakan fiskal dan moneter perlu dilakukan secara hati-hati untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan stabilitas keuangan dari krisis. Dalam hal ini, kebijakan fiskal dan moneter harus berpijak ke kepentingan nasional dan memerhatikan kepentingan masyarakat.
- c. Sinergi untuk memperkuat inovasi dan digitalisasi dalam rangka mewujudkan inklusivitas. Inovasi dan digitalisasi harus menjangkau seluruh rakyat serta mampu mendorong pemerataan dan keadilan ekonomi, jangan menjadi sumber baru terjadinya ketimpangan ekonomi.

Sejalan dengan arahan Bapak Wakil Presiden RI, ISEI telah menyusun 5 strategi pokok yang akan dijadikan program konkret ISEI ke depan, yaitu :

- a. Pertama penguatan sinergi untuk menjaga stabilitas harga melalui kerjasama antar daerah. ISEI akan terus bersinergi, bersama seluruh pemangku kepentingan lainnya, mendukung upaya Pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, sinergi ABG yang telah berjalan sangat baik, akan terus ditingkatkan.

- b. Kedua, penguatan sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan ini, sinergi ISEI dengan berbagai pemangku kepentingan akan terus ditingkatkan, terutama dalam menjaga ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya serta peningkatan sektor pariwisata.
- c. Ketiga, inklusi keuangan melalui pemberdayaan UMKM. Sinergi ISEI dilakukan untuk optimalisasi pemberdayaan perempuan dalam pengembangan UMKM, di antaranya melalui penguatan organisasi UMKM melalui pembentukan klaster, termasuk perluasan akses pembiayaan.
- d. Keempat, akselerasi digital untuk mendorong ekonomi dan keuangan. Peran strategis ISEI diperlukan untuk memberikan pemikiran-pemikiran dan solusi konkret bagaimana reformasi struktural dilakukan. Reformasi struktural terutama dilakukan dalam mempercepat transformasi digital, khususnya di bidang ekonomi-keuangan dan pendidikan, termasuk mendorong digitalisasi proses bisnis pelaku usaha didaerah dan pengembangan *start up* lokal yang berbasis teknologi,
- e. Kelima, penguatan dari ekonomi hijau di berbagai cabang ISEI.

Dari sisi kelembagaan, transformasi ISEI terus dilakukan secara berkelanjutan, menyeluruh dan lebih inklusif, baik dari sisi organisasi, kebijakan, riset, akreditasi, maupun kerja sama. Terdapat 7 (tujuh) kemajuan yang berhasil ditorehkan oleh ISEI :

- a. Pertama, implementasi atas AD/ART yang telah dilakukan lebih terstruktur, terpadu, dan *forward looking* di berbagai cabang. AD/ART disusun dengan konsep ABG (Akademisi, Bisnis dan *Government*) karena sinergi adalah kekuatan dari ISEI;
- b. Kedua, Kajian Kebijakan Publik merupakan sumbangsih pemikiran ISEI untuk memperkuat sinergi pemerintah, berbagai pemangku kepentingan di pusat dan daerah, dalam rangka memperkuat sta-

- bilitas, mendorong pemulihan, memperkuat digitalisasi dan inklusi ekonomi Indonesia;
- c. Ketiga, "*Indonesian Economic Journal*" (IEJ) mendapat perolehan indeks nasional (SINTA 4), hal ini merupakan wujud pengakuan atas wadah publikasi riset anggota ISEI secara berkelas dan berkesinambungan;
 - d. Keempat, telah berjalannya proses akreditasi prodi Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Akuntansi (EMBA) perguruan tinggi negeri maupun swasta oleh LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi);
 - e. Kelima, Index Survei Ekonomi Indonesia (ISEI) yang sedang dalam tahap finalisasi, untuk nantinya segera kita luncurkan dan menjadi salah satu barometer indikator survei ekonomi di Indonesia;
 - f. Keenam, penguatan kerjasama dengan berbagai lembaga prominent di tingkat regional dan internasional;
 - g. Ketujuh, perluasan organisasi dengan mengandeng pemerintah daerah yang sudah disesuaikan dengan AD/ART, saat ini keanggotaan ISEI berjumlah 6.750.

Ke depan, pengurus ISEI akan terus bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan antara lain melalui: (i) perumusan "perspektif pemikiran dan rekomendasi kebijakan ekonomi ISEI" sebagai masukan kepada Pemerintah (Pusat dan Daerah), serta para pemangku kepentingan lainnya, baik melalui Kajian Kebijakan Publik maupun kajian tematik; (ii) melanjutkan proses akreditasi program studi ekonomi, manajemen, bisnis, akuntansi melalui LAMEMBA; serta (iii) melanjutkan penguatan kerja sama baik tingkat regional maupun internasional. Selain itu, telah diputuskan bahwa sidang pleno tahun 2023 akan dilaksanakan di Provinsi Bengkulu.

Seluruh anggota dan Pengurus ISEI Pusat dan Daerah akan terus mendukung dan memberikan rekomendasi penguatan terhadap pemerintah. ISEI tetap terus berkomitmen untuk bersama pemerintah dan berbagai pihak menyumbangkan pemikiran-pemikiran bagi kemajuan ekonomi Indonesia, kesejahteraan rakyat dan juga pengabdian masyarakat. Dunia terus bergejolak. Kita tidak boleh lengah. ISEI menggagas dan memperkuat sinergi *Academicians, Business and Government (ABG)* di pusat maupun daerah. Mari kita perkuat ISEI agar ekonomi Indonesia hebat. Kami mengucapkan terimakasih atas segala dukungan seluruh sponsor, segenap pemangku kepentingan, dan seluruh panitia dan peserta yang telah mempersiapkan, menyelenggarakan dan menghadiri Sidang Pleno ISEI XXII & Seminar Nasional 2022.

Semarang, 24 Agustus 2022

Perry Warjiyo, PhD

Ketua Umum Pengurus Pusat ISEI



SAMBUTAN WAKIL PRESIDEN RI

Saat ini Indonesia dihadapkan tantangan baru dari faktor global, yakni perlambatan ekonomi dunia yang dibarengi lonjakan inflasi. Harga pangan dan energi dunia yang tinggi berpotensi menular menjadi lonjakan inflasi di dalam negeri. Pada 2008 Indonesia pernah mencatat inflasi tinggi hingga 11,06 persen karena saat itu harga energi dan pangan yang juga melonjak. Kita pernah hadapi masalah serupa pada 2008. Saat itu pilihan kebijakan terbatas dan tidak mudah. Tapi, sejarah menunjukkan Indonesia bisa keluar dari krisis 2008 dengan baik dan kembali ke jalur pemulihan ekonomi tahap demi tahap. Saya yakin saat ini pun kita juga bisa melaluinya.

Selanjutnya terdapat beberapa tantangan ekonomi domestik, yaitu: pertama, Kontribusi sektor industri terhadap PDB mengalami penurunan. Kedua, kemandirian pangan dan energi belum terjadi. Ketiga, pertumbuhan ekonomi secara utuh dimana harus adanya pemerataan ekonomi (pendidikan, kesehatan) di semua lapisan masyarakat tidak boleh adanya ketimpangan dan kepincangan ekonomi.

Diperlukan strategi yang baik dalam mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan ekonomi merupakan mandat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa, seperti yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Gagasan yang tajam dan dalam dibutuhkan agar sumber daya ekonomi bisa dimanfaatkan untuk menopang tujuan tersebut.

Selanjutnya kemajuan ekonomi yang begitu pesat dicapai oleh Indonesia tidak boleh memunculkan ketimpangan dan kepincangan di masyarakat. Wapres pun menyampaikan empat gagasan dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat.

Pertama, memapankan suplai dan rantai pasok kebutuhan pokok. Ketersediaan bahan kebutuhan pokok ini sangat penting dan harus dipastikan, sehingga tidak memunculkan gangguan pasokan di akar rumput. Stabilitas ekonomi yang paling mendasar, salah satunya ditandai dengan terjaminnya kebutuhan pokok masyarakat, khususnya pangan. Trilogi 3F, yakni food, fuel, finance atau komoditas pangan, energi, dan keuangan, menjadi tiga hal yang harus dijaga stabilitasnya. Sebab, ketiganya unsur vital dalam menjaga perekonomian negara.

Kedua, mendesain bauran kebijakan fiskal dan moneter yang efektif. Kehati-hatian dalam menyusun kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan menjadi langkah penting untuk mencegah risiko krisis. Dengan kehati-hatian dalam menyusun bauran kebijakan tersebut, Wapres berharap dapat memberikan keberpijakan pada kepentingan nasional dan sensitif terhadap kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Ketiga, memperkuat inovasi dan digitalisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Inovasi dan digitalisasi menjadi penting, khususnya sejak pandemi COVID-19 yang telah melahirkan berbagai cara kerja baru di seluruh tatanan kehidupan. Dengan penguatan pada inovasi dan digitalisasi dalam jangka panjang, diharapkan dapat menjangkau kelompok masyarakat di seluruh pelosok Indonesia yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi.

Keempat mendorong pemerataan dan keadilan ekonomi. Sejumlah upaya yang dapat terus dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mendorong pemerataan ini, di antaranya dengan mempromosikan bangun usaha koperasi, membatasi penguasaan lahan, akses modal bagi pelaku UMKM, penguasaan BUMN terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan industrialisasi perdesaan yang berbasis sumber daya lokal.

Saya berpesan kepada seluruh anggota ISEI untuk terus menjalankan fungsinya sebagai pakar ekonomi dalam mewujudkan tujuan besar

Indonesia, yaitu pemerataan keadilan ekonomi di seluruh negeri. ISEI yang anggotanya merupakan para pemikir ekonomi yang tersebar di berbagai institusi, tentunya memegang peran vital untuk menghadirkan gagasan yang segar dalam menata perekonomian nasional yang lebih kokoh. Saya mengharapkan Seminar Nasional 2022 ini ISEI dapat melahirkan pemikiran yang cemerlang dan mempunyai nilai guna bagi pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan bermartabat di masa depan,

Jakarta, 24 Agustus 2022

K.H. Ma'ruf Amin
Wakil Presiden RI



Ringkasan Eksekutif Paparan Narasumber Seminar Nasional

“MEMPERKUAT SINERGI UNTUK MENJAGA STABILITAS DAN MENDORONG MOMENTUM PEMULIHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DI ERA DIGITAL”

Ketua Dewan Komisiner OJK, Mahendra Siregar meyakini bahwa sinergitas dan inklusivitas ekonomi dapat menjadi navigator dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi secara global. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang terkendali menjadi bukti resiliensi ekonomi Indonesia, dan harus dijadikan pijakan untuk mengatasi masalah yang terjadi di skala global. Badai ekonomi yang terjadi di dunia saat ini perlu dikenali seberapa besar dampak yang dapat terjadi terutama yang akan berdampak pada masyarakat. Permasalahan inflasi saat ini sebenarnya lebih karena permasalahan rantai pasok dan tensi geopolitik yang harus diatasi oleh pemerintah.

Persaingan kenaikan suku bunga yang dilakukan banyak Bank Sentral sebenarnya tidak tepat dan seharusnya tidak terjadi. Banyak kebijakan yang diambil Pemerintah yang sedang berkonflik justru membuat adanya beban masalah baru dan kebijakan yang ditempuh otoritas moneter juga tidak bisa mengatasi masalah yang dibuat Pemerintah yang tengah berkonflik tersebut (*miss match and miss represented*). Dari sisi perbankan terlihat makin sehat, namun dari sisi kredit terutama yang perlu di restrukturisasi khususnya sektor yakni akomodasi dan makanan minuman serta sebagian sektor transportasi. Perlu dilakukan penajaman di daerah dan tidak dapat menggunakan “*Helicopter View*” apalagi “*Jakarta View*” sebagai pijakan pengambilan keputusan. Perekonomian di setiap daerah di Indonesia perlu diperkuat untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Kekuatan Indonesia menghadapi badai dunia adalah apa yang

disebut konsumsi dalam negeri, artinya dalam penjabarannya adalah kekuatan ekonomi di daerah, di seluruh dan masing-masing daerah di provinsi, kabupaten, kota.

Sektor keuangan Indonesia cukup stabil di tengah terhambatnya rantai pasok global yang diakibatkan oleh konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Karena itu, Indonesia tidak perlu mengikuti negara lain dalam memperketat kebijakan moneter. Inflasi kita relatif terkendali, demikian juga pasar modal dan pasar uang, serta perbankan yang kondisinya semakin sehat dibandingkan saat kita berada di puncak pandemi.

OJK akan melakukan reformasi yakni kantor operasional dan regional OJK yang ada di Komisioner Eksekutif Perbankan akan dipindah langsung di bawah Ketua OJK karena pendekatannya akan menjadi pengawasan, pelayanan, mobilisasi, fasilitasi dalam perbankan, pasar modal, IKNB, dan masyarakat, namun memerlukan banyak dukungan terutama Pemerintah Daerah. Selanjutnya pengawasan kantor OJK di setiap regional pun akan dipindah menjadi tanggung jawab ketua Dewan Komisiner, setelah sebelumnya berada di bawah komisiner eksekutif perbankan. Karena pendekatannya bukan lagi terkait pengawasan perbankan semata, tetapi juga pengawasan pelayanan, mobilisasi, dan fasilitasi baik untuk sektor perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank, dan masyarakat yang belum *bankable* sehingga ditarik ke bawah ketua untuk mewujudkan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif.

Wakil Menteri Keuangan RI, Suhasil Nazara, menyatakan bahwa kasus COVID-19 saat ini terkendali, namun kita tidak boleh lengah, tetapi harus percaya diri agar ada pergerakan aktivitas ekonomi. Pada saat risiko pandemi sudah menurun muncul risiko baru, yakni risiko global dalam bentuk kenaikan harga (inflasi). Inflasi global yang melonjak akan mengakibatkan pengetatan likuiditas yang ditunjukkan kenaikan suku bunga di berbagai negara. Inflasi Indonesia tetap terkendali dan pertumbuhan ekonomi masih terjadi.

Volatilitas ekonomi global yang tinggi mengakibatkan pemerintah dan dunia usaha kesulitan melakukan forecasting. Dari sisi Surat Berharga Negara (SBN), terjadi kenaikan *yield*, oleh karena itu perlu diupayakan defisit pembiayaan rendah dan efisiensi pendanaan. Kebijakan fiskal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai *shock absorber* harus dilakukan bersama-sama oleh berbagai pihak karena harus mengatasi inflasi (terutama komoditas energi tidak boleh terjadi terlalu cepat), menjaga daya beli (memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat paling membutuhkan), dan menjaga momentum pemulihan terjadi selama mungkin. Arsitektur APBN tahun 2023 tetap optimis dan waspada dengan modalitas peningkatan produktivitas untuk mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya tiga peranan APBN terkait pemulihan ekonomi di Indonesia sangat perlu diperhatikan. Pertama, mengontrol inflasi dengan menjaga harga energi agar tidak naik terlalu cepat. Kedua, menjaga daya beli konsumsi masyarakat. Ketiga, menjaga supaya momentum pemulihannya berlanjut semaksimal mungkin. Saat ini, APBN menjaga inflasi dengan menjaga agar harga energi jangan naik terlalu cepat. Pemerintah mengalokasikan subsidi 502 triliun rupiah, aslinya subsidi 152 triliun rupiah. Jika harga stabil, pemulihan ekonomi pun akan stabil, sehingga membuat konsumsi energi lebih tepat.

Sementara itu, dalam hal menjaga daya beli, APBN berperan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Saat ini, inflasi dalam negeri relatif terkontrol, yakni di bawah 5%. Dengan inflasi yang masih terkendali tersebut, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat melesat di atas 5%.

Kemenkeu RI mengajak semua pihak untuk membantu meringankan beban fiskal ini. Kebijakan fiskal ini tidak bisa berjalan sendiri. Perlu sinergi dari lembaga negara ekonomi lainnya, seperti Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu juga perlu dukungan parlemen serta masyarakat dan lembaga non-pemerintah.

Pemerintah juga mewaspadaikan ketidakpastian perekonomian global karena konflik geopolitik, salah satunya di antara Rusia dan Ukraina, dengan mulai mengembalikan defisit anggaran ke bawah tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) mulai tahun 2023. Tantangan yang dihadapi perekonomian nasional pada 2023, tidak lagi pandemi covid-19, tapi telah bergeser menjadi ketidakpastian global. Tapi bukan berarti setelah ini kita lengah menghadapi pandemi. Hanya saja, perekonomian yang tadinya berhenti karena pandemi sekarang harus mewaspadaikan ketidakpastian global.

Pandemi covid-19 dan ketidakpastian global perlu menjadi perhatian utama akademisi ekonomi, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Cara kita menangani perekonomian tidak bisa hanya menggunakan teori ekonomi, tetapi *beyond economics* yang arahnya selain penanganan pandemi dan ketidakpastian global, kita harus selalu mampu menyeimbangkannya.

Deputi IV Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM-Kemenko Perekonomian, M Rudy Salahudin, menyatakan bahwa pada tahun 2021, nilai ekonomi digital di Indonesia tertinggi di ASEAN (\$70 miliar). Nilai ekonomi ini akan diperkirakan akan terus bertambah menjadi \$145 miliar pada tahun 2025, dan \$ 330 miliar pada tahun 2030. Resiliensi UMKM menjadi sangat penting dimana dari 65 juta unit, baru sebagian kecil saja yang masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital.

Kebijakan pemerintah untuk membangun ekosistem perekonomian digital. Ada dua hal yang dilakukan pemerintah. Pertama, penguatan ekosistem UMKM itu sendiri terkait dengan perizinan, pajak, sertifikasi, akses pasar, pembiayaan, pelatihan pendampingan, dan akses bahan baku. Kedua, memperkuat ekosistem e-commerce itu sendiri, yang meliputi penciptaan iklim usaha yang sehat, pembayaran digital, dan perlindungan data pribadi, pengendalian informasi, serta penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan infrastruktur digital.

Oleh karenanya, sejumlah strategi pengembangan UMKM digital yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui korporatisasi UMKM dan gerakan 'Bangga Buatan Indonesia' yang di tahun 2021 lalu telah mencapai lebih dari 19 juta unit yang masuk ke dalam ekosistem digital. Kemudian dalam upaya membangun ekosistem perekonomian digital, pemerintah juga mengalami sejumlah tantangan, yakni kualitas internet yang masih kalah bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya, kurangnya SDM yang bertalenta dalam mendukung ekosistem ekonomi digital, serta belum optimalnya literasi digital yang ada di Indonesia.

Ini menjadi tantangan kita, sehingga pemerintah dalam hal ini terus mendorong adanya percepatan infrastruktur digital melalui pembangunan *high-throughput satellite (HTS)*. Untuk mendorong kapasitas dari SDM, pemerintah mendorong melalui beberapa skema, baik itu melalui revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi maupun juga melalui pelatihan yang ada di berbagai kementerian.

Ketua Umum KADIN, M. Arsyad Rasjid P.M., melihat COVID-19 sebagai perang melawan pandemi dan perang melawan ekonomi dengan upaya gotong royong yang dilakukan perekonomian Indonesia bangkit dan telah pulih dengan berbagai data yakni pertumbuhan ekonomi tinggi, ekspor yang tinggi, realisasi investasi dan kenaikan target investasi. Tantangan yang harus dihadapi Indonesia adalah konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina yang berpengaruh terhadap inflasi domestik namun dapat menjadi peluang karena tingginya harga beberapa komoditas yang dimiliki Indonesia.

Dalam masalah ketahanan pangan, KADIN melihat perlunya adanya penguatan *agro industry* (pendampungan UMKM dari perusahaan besar) dan *closed loop ecosystem* (investasi infrastruktur logistik dan rantai pasok). Hambatan besar dalam transisi energi adalah butuhnya pendanaan yang besar dan keterbatasan SDM serta teknologi padahal potensi besar yakni adanya tambahan nilai ekonomi sebesar \$ 100-125 Miliar. KADIN mendorong meningkatkan awareness sektor EBT, menggunakan skema

public private partnership, transfer IPTEK dan perlu adanya kebijakan serta insentif dari Pemerintah.

Adopsi teknologi menjadi tantangan terutama dalam sektor UMKM. Apabila pelaku ekonomi fokus pada digitalisasi maka pertumbuhan produktivitas tenaga kerja akan mencapai \$35 Miliar. *Key Enabler* untuk menghadapi tantangan pemulihan ekonomi dan mewujudkan Indonesia Emas 2045 yakni: kepastian hukum, kolaborasi lintas sektor (skema *public private partnership*), dan stabilitas dalam negeri (bertanding untuk bersanding).

CEO Mapan, Ardelia Aпти, mengatakan bahwa masyarakat perlu suatu *social fintech* untuk membantu pengguna di segmen *low income* untuk meningkatkan daya beli mereka melalui layanan *group buying*. Prinsip kerja Mapan adalah arisan dengan teknologi yang mendukung kekuatan komunitas lokal. Tujuan “Mapan” adalah meningkatkan daya beli dan inklusi keuangan rakyat luas melalui teknologi dan pemberdayaan komunitas wanita produktif. Mapan memungkinkan kerjasama antara anggota komunitas untuk meningkatkan taraf hidup bersama didirikan pada tahun 2009, misi “Mapan” adalah memberdayakan kelompok berpenghasilan menengah ke bawah untuk mencapai “Mapan”, keadaan sejahtera finansial, dengan memberikan akses yang sama terhadap produk dan layanan.

Dibalik pendirian perusahaan dan layanan “Mapan”, *founders* “Mapan” melihat adanya isu akses untuk barang dan juga layanan finansial berkualitas untuk masyarakat menengah kebawah untuk menyalurkan teknologi yang dapat membantu mengentaskan isu tersebut, pendiri “Mapan” memilih Arisan, metode menabung yang awam digunakan di Indonesia, sebagai objek digitalisasi. Arisan adalah metode menabung yang sangat terkenal di Indonesia, mengambil model yang sudah dimengerti komunitas menengah kebawah menjadi prinsip penting yang dipercaya dapat membuat penetrasi teknologi ini dapat terjadi dengan mudah dan *sustainable*.

Arisan juga memiliki aspek dinamika sosial, yang dipercaya sebagai cara yang tepat untuk menjangkau masyarakat luas dan memastikan motivasi yang *sustainable* lewat komunitas wanita produktif. Teknologi Arisan “Mapan”, memberikan makna baru ke dinamika Arisan, dengan mengubah tujuan Arisan untuk menabung agar mampu membeli barang rumah tangga yang diimpikan. Dengan model bisnis dan teknologi, kontribusi “Mapan” tidak berhenti di agen dan anggota “Mapan” saja, namun juga untuk pemasok lokal (*suppliers*) yang kini memiliki akses untuk menjangkau masyarakat menengah-kebawah secara *cost-efficient*.



POLICY RECOMMENDATION ISEI

24 Agustus 2022

Disampaikan oleh:

Dody Budi Waluyo, MBA

*Ketua Bidang Kajian dan Rekomendasi Kebijakan
Pengurus Pusat ISEI*

Perekonomian dunia saat ini dalam kondisi penuh tantangan yang berat. Keberlangsungan pemulihan ekonomi global pascapandemi Covid-19, dihadapkan pada 3 (tiga) tantangan utama.

- Pertama, semakin meningkatnya risiko stagflasi, terutama di negara maju. Inflasi global terus menunjukkan tren peningkatan, sementara pertumbuhan ekonomi dunia mengalami pelambatan. Pada Juli 2022 lalu, IMF merevisi tingkat inflasi global untuk tahun 2022 dari 7,4% (yoy) menjadi 8,3% (yoy) dan untuk tahun 2023 dari 4,8% (yoy) menjadi 5,7% (yoy), jauh lebih tinggi dari tahun 2021 yang berada pada 4,7% (yoy). Kenaikan inflasi global setidaknya bersumber pada: dampak pandemi yang menyebabkan terganggunya rantai pasokan global, perang Ukraina serta penerapan sanksi dan retaliasinya, meluasnya implementasi kebijakan proteksionisme khususnya pangan (sampai Juli 2022 terdapat 35 negara yang mengimplementasikan kebijakan proteksionisme pangan), perbaikan ekonomi pascapandemi yang menyebabkan keketatan pasar tenaga kerja (*labor market tightness*) di negara maju yang berdampak pada inflasi dari sisi upah, dan meningkatnya ekspektasi inflasi yang terlihat dari consensus forecast di berbagai negara khususnya AS.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dunia mulai mengalami pelambatan. Proses pemulihan ekonomi dunia yang belum merata akan kembali tertekan pada 2022. Pertumbuhan ekonomi global 2022 dan 2023 juga akan lebih rendah dari perkiraan semula. Pertumbuhan ekonomi global pada 2022 dan 2023 direvisi ke bawah masing-masing dari 3,5% (yoy) menjadi sebesar 2,9% (yoy) dan

dari 3,4% (yoy) menjadi 2,8% (yoy). Revisi ke bawah pertumbuhan ekonomi dilakukan pada hampir seluruh negara termasuk AS, Eropa, Jepang, Tiongkok, dan India. Hal lain yang perlu diwaspadai adalah meningkatnya risiko terjadinya kekhawatiran resesi di AS mengingat sumber tekanan inflasi berasal dari sisi permintaan, sehingga membutuhkan respons yang signifikan dari The Fed untuk menurunkan tekanan inflasi.

Pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif dan meningkatnya risiko stagflasi mendorong peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Hingga Agustus 2022, berbagai indikator risiko ketidakpastian pasar keuangan, seperti VIX dan EPU, terus menunjukkan peningkatan. Pasar saham dan obligasi juga menunjukkan kenaikan volatilitas yang cukup tinggi. Yield UST 10 year meningkat, sementara harga saham AS melemah. Persepsi risiko negara berkembang juga meningkat. Tingginya ketidakpastian pasar keuangan global tersebut menyebabkan aliran modal keluar dan meningkatnya tekanan nilai tukar negara-negara berkembang. Ke depan, ketidakpastian pasar keuangan global masih akan tinggi.

- Kedua, megatren digitalisasi. Digitalisasi ekonomi-keuangan global berlangsung sangat cepat, dengan dominasi BigTech serta semakin meluasnya transaksi e-commerce dan sistem pembayaran antarnegara. Digitalisasi telah dimulai sebelum pandemi Covid-19, didorong oleh kemajuan teknologi digital seperti *internet of things (IoT)*, *cloud computing*, *big data*, dan *artificial intelligence (AI)* termasuk *machine learning* dan *deep learning*, serta *metaverse*. Teknologi ini mampu menghadirkan produk (barang dan jasa) melalui *smartphone*, kapanpun dan dimanapun. Sejak pandemi Covid-19, dengan pembatasan mobilitas, digitalisasi ekonomi dan keuangan termasuk sistem pembayaran semakin terakselerasi. Pada konteks mata uang digital (*sovereign digital money*), perkembangan digitalisasi diwarnai dengan analisis dan diskusi mengenai *Central Bank Digital Currency (CBDC)*. Survei terbaru IMF menunjukkan 90%

dari bank sentral anggota IMF berminat dan tengah melakukan review atas CBDC. Tak ayal, ekonomi dan keuangan digital mampu menjadi salah satu sumber baru pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat inklusi ekonomi dan keuangan. Di sisi lain, muncul sejumlah risiko baru dari digitalisasi yang perlu dimitigasi dengan tepat mengingat ke depan ekonomi-keuangan digital akan terus meningkat pesat. Termasuk didalamnya, isu kepemilikan dan perlindungan data pribadi, pajak transaksi digital, layanan jasa keuangan oleh entitas bukan lembaga keuangan (*shadow banking*), meluasnya penggunaan *cryptocurrency* dan *crypto assets* yang memiliki risiko relatif tinggi karena tidak terdapat *underlying transaction*, serta tingginya serangan siber.

- Ketiga, semakin meningkatnya tuntutan pengembangan ekonomi-keuangan hijau. Perubahan iklim dapat berdampak sangat signifikan, baik terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, maupun terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari sisi stabilitas makroekonomi, perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem dapat mengganggu sisi suplai (*physical risk*) terutama produk-produk pangan, sehingga menimbulkan tantangan terhadap pencapaian target inflasi oleh bank sentral. Di samping itu, dampak transition risk dari respons kebijakan yang mendukung ekonomi hijau, seperti carbon tax, juga berpotensi menambah tekanan terhadap harga. Dari sisi stabilitas sistem keuangan, perubahan iklim global juga menimbulkan ancaman, termasuk karena adanya transformasi ekonomi hijau yang memengaruhi kualitas eksposur perbankan terhadap perusahaan-perusahaan yang terdampak bencana alam. Hal yang serupa juga terjadi pada pertumbuhan ekonomi yang berisiko tertekan baik dari sisi suplai maupun permintaan. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah bagaimana memitigasi risiko perubahan iklim melalui kebijakan yang mendorong ekonomi dan keuangan hijau, dengan memitigasi unintended consequences dari kebijakan tersebut terhadap perekonomian jangka pendek.

Namun demikian, kita patut bersyukur perekonomian domestik terus membaik, stabilitas terjaga. Memasuki triwulan II 2022, perekonomian Indonesia terus membaik dengan tumbuh sebesar 5,44% (yoy), melanjutkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat 5,01% (yoy). Perbaikan terutama didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, tetap terjaganya kinerja ekspor, serta masih tumbuh kuatnya investasi sejalan dengan membaiknya prospek ekonomi dan perbaikan iklim usaha. Perbaikan pertumbuhan ekonomi juga lebih merata, terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Stabilitas eksternal juga tetap terjaga di tengah tekanan aliran modal portofolio dan stabilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Sementara itu, inflasi cenderung meningkat (IHK Juli 2022 mengalami inflasi sebesar 4,94% (yoy)) terutama akibat tekanan dari sisi penawaran seiring dengan kenaikan harga komoditas global yang tercermin pada tingginya inflasi kelompok volatile food/VF (11,47% yoy) dan inflasi kelompok administered prices/AP (6,51% yoy). Inflasi kelompok AP yang tinggi dipengaruhi kenaikan bahan bakar avtur yang mendorong inflasi angkutan udara. Kelompok inflasi inti masih terkendali pada level 2,86% (yoy) sejalan dengan output gap yang masih negatif dan dukungan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi inflasi. Perbaikan ekonomi tersebut akan berlanjut ke depan, sehingga untuk keseluruhan tahun 2022 dapat mencapai 4,5-5,3% (yoy). Namun demikian, melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dan meningkatnya tekanan inflasi domestik tetap perlu diwaspadai, karena berisiko menekan kinerja ekspor dan konsumsi swasta. Dalam jangka menengah-panjang, ekonomi Indonesia berpotensi untuk tumbuh pada lintasan yang membaik, sehingga mampu mementaskan ekonomi Indonesia menjadi negara maju pada 2045.

Menghadapi tantangan ke depan, kerangka sinergi kebijakan tetap perlu diarahkan pada upaya perbaikan struktur ekonomi dan mengatasi permasalahan siklikal jangka pendek. Tiga tantangan perekonomian global, yakni risiko stagflasi, megatren digitalisasi, dan ekonomi-keuangan hijau, harus ditangani dengan penguatan sinergi antarotoritas. Sinergi kebijakan untuk akselerasi vaksinasi dan penanganan Covid-19 dengan perluasan sektor-sektor ekonomi prioritas sangat diperlukan sebagai

kebijakan prasyarat (*necessary*) untuk mendorong berlanjutnya proses pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi perlu didorong dengan perluasan sektor-sektor prioritas. Pengembangan 38 sektor prioritas melalui Paket Kebijakan Terpadu KSSK tahun 2021 dan 8 sektor prioritas tambahan perlu terus diperkuat untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Akselerasi reformasi sektor riil juga perlu terus dikedepankan untuk mendukung pengembangan 46 sektor prioritas tersebut. Reformasi sektor riil ini perlu diarahkan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing ekonomi nasional. Sinergi kebijakan moneter, makroprudensial, dan fiskal perlu diarahkan pada upaya memperkuat stabilitas (*pro-stability*) dengan tetap mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pengembangan pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau tetap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*). Kebijakan fiskal tetap perlu diarahkan sebagai shock absorber dari tekanan perkembangan global. Akselerasi reformasi sektor keuangan diarahkan untuk mendukung peningkatan dan kemudahan pembiayaan dari sektor keuangan kepada dunia usaha. Penguatan digitalisasi ekonomi-keuangan dan kebijakan hijau diarahkan untuk mendorong akselerasi inklusi ekonomi-keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi.

Untuk mendukung ekonomi Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, ISEI telah merumuskan rekomendasi penguatan kebijakan yang terbagi ke dalam 3 kelompok.

Kelompok pertama, rekomendasi untuk memperkuat sinergi dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi. Momentum pemulihan ekonomi pascapandemi masih menghadapi tantangan yang tidak ringan. Dalam upaya menjaga berlanjutnya momentum pemulihan di tengah peningkatan tekanan global terhadap stabilitas, peran bauran kebijakan semakin strategis. Sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda), serta Kementerian/Lembaga (K/L) terkait juga menjadi kunci keberhasilan menjaga stabilitas perekonomian. Untuk itu, rekomendasi penguatan sinergi kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi mencakup:

1. Melanjutkan kebijakan makroekonomi yang konsisten dan berhati-hati. Tiga pelajaran penting yang didapat dalam hal pengelolaan kebijakan makroekonomi: (i) kebijakan nonkonvensional (*unconventional policy*) melalui bauran kebijakan untuk memitigasi dampak Covid-19 dapat terlaksana dengan baik terutama karena implementasi kebijakan yang dilaksanakan memiliki kredibilitas yang kuat; (ii) untuk merespons dampak luar biasa (*extraordinary shock*) akibat pandemi Covid-19 maka dibutuhkan juga kebijakan luar biasa (*extraordinary policy*); dan (iii) koordinasi dan komunikasi berperan penting dalam memengaruhi pembentukan ekspektasi, yang pada gilirannya akan berdampak pada efektivitas kebijakan dalam mencapainya. Kebijakan ini mencakup:
 - Kebijakan fiskal sebagai *shock absorber* dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka pendek, kebijakan fiskal yang bersifat *counter-cyclical* sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kontraksi ekonomi yang lebih dalam. Sementara itu, kebijakan fiskal dapat mengatasi *shock* dalam jangka pendek dan menengah melalui optimalisasi penerimaan pemerintah dan peningkatan efisiensi belanja pemerintah. Di sisi lain, meningkatnya transaksi *e-commerce* memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan. Selain itu, Pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang tetap tumbuh positif di masa pandemi dengan mengurangi lapisan tarif CHT dan menurunkan batasan golongan produksi. Langkah lainnya yaitu mengenakan cukai pada produk plastik dan minuman berpemanis yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan, sekaligus menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat. Peningkatan efisiensi belanja pemerintah juga dapat terus diupayakan melalui pengurangan subsidi BBM. Usulan lainnya yaitu merubah pola penyerapan anggaran tidak lagi rendah pada awal tahun dan meningkat drastis pada akhir tahun karena pola ini tidak menguntungkan bagi perekonomian Indonesia.

- Kebijakan fiskal juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Hal tersebut salah satunya melalui penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk seluruh transaksi perpajakan. NIK merupakan identitas dasar yang dimiliki oleh setiap orang (bahkan untuk anak yang baru lahir), maka jumlah orang yang masuk ke dalam sistem perpajakan akan meningkat drastis. Kondisi ini berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dalam jangka panjang, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengurangi tekanan terhadap APBN, terdapat tiga pelajaran yang bisa diambil dari kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 dan 2021, yaitu:

- i. Perlunya alokasi anggaran yang cukup untuk kesehatan agar pelaksanaan 3T (*Testing, Tracing, dan Treatment*) berjalan dengan baik. Hal ini penting mengingat sektor kesehatan yang membaik akan mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat.
- ii. Perlunya fokus pada kebijakan yang meningkatkan permintaan (*demand boosting*). Sebagai contoh, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin atau terdampak pandemi yang dapat mendorong daya beli di tengah pembatasan mobilitas masyarakat akibat pandemi.
- iii. Perlunya mempertimbangkan kembali kebijakan yang bersifat mengurangi biaya (*cost-reducing policies*) karena memiliki *leverage* terbatas. Misalnya, pembebasan PPh 22 untuk barang impor akan mengurangi biaya produsen, namun dalam situasi pandemi Covid-19 menyebabkan permintaan suatu barang lebih rendah dari harga yang ditawarkan produsen. Oleh karena itu, produsen tidak memiliki insentif untuk memproduksi walaupun biaya produksi turun.

Kebijakan moneter oleh Bank Indonesia perlu terus dilanjutkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, sementara kebijakan makroprudensial akomodatif, digitalisasi sistem pembayaran, pengembangan pasar uang, dan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Lebih rinci, penguatan kebijakan ini mencakup antara lain:

- i. Penguatan pengendalian inflasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional melalui koordinasi kebijakan antarotoritas;
 - ii. Implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif dalam upaya mengakselerasi pemulihan intermediasi;
 - iii. Stabilisasi nilai tukar sebagai bagian dari pengendalian inflasi melalui intervensi di pasar valas yang didukung penguatan operasi moneter.
2. Pada konteks penguatan bauran kebijakan nasional, sinergi kebijakan nasional dalam mengatasi pandemi Covid-19 dengan satu kondisi prasyarat (*necessary condition*) dan lima kebijakan sebagai kondisi yang diperlukan (*sufficient conditions*) perlu dilanjutkan. Satu kondisi prasyarat tersebut yaitu vaksinasi dan disiplin dalam penerapan protokol Covid-19, sementara lima kebijakan sebagai kondisi yang diperlukan mencakup: (i) akselerasi transformasi sektor riil; (ii) sinergi stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial dengan kebijakan fiskal; (iii) akselerasi transformasi sektor keuangan; (iv) digitalisasi ekonomi dan keuangan; dan (v) ekonomi dan keuangan hijau.
 3. Sinergi Pemerintah Pusat dan Pemda, serta Bank Indonesia untuk mencapai kestabilan harga atau inflasi terus diperkuat. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui TPI/TPID dengan Program 4K: Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. Untuk mengatasi tingginya tekanan kenaikan harga pangan pada inflasi VF, penguatan sinergi pengendalian inflasi terutama dari sisi suplai antara lain diwujudkan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). GNPIP ditujukan untuk

menjaga kestabilan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen, memperbaiki efisiensi rantai pasok dan manajemen stok komoditas pangan, serta meningkatkan produktivitas dan diversifikasi produk olahan. Dengan implementasi GNPIP secara integratif dan masif di berbagai daerah, inflasi VF akan dapat dijaga maksimal sebesar 5% (yoy).

Kelompok kedua, rekomendasi untuk memperkuat sinergi dalam rangka mendorong momentum pemulihan ekonomi, yang mencakup penguatan kebijakan pada 12 sektor kebijakan, sebagaimana dalam tabel berikut.

No.	Sektor	Rekomendasi Penguatan Kebijakan
1.	Sektoral Penopang Pemulihan Ekonomi	i. Penguatan ketahanan pelaku usaha pascapandemi Covid-19; ii. Optimalisasi pemanfaatan belanja daerah, termasuk Program Aksi Afirmasi Pembelian Produk Dalam Negeri (PDN) terutama UMKM; dan iii. Terjaganya ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi.
2.	Energi	i. Upaya diversifikasi berkelanjutan untuk menghindari ketergantungan pada satu komoditas energi tertentu, termasuk transisi hijau (dari batubara ke energi bersih) yang didukung dengan pembiayaan yang memadai melalui obligasi hijau dan sukuk hijau, blended finance, carbon pricing, dan taksonomi hijau; ii. Komitmen kuat untuk dekarbonisasi dan transisi energi yang adil dan terjangkau; dan iii. Mempercepat kerangka regulasi untuk percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

3.	Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> i. Jangka pendek: penguatan monitoring dan koordinasi pada KAD antarwilayah yang mengalami surplus dan defisit; ii. Jangka menengah-panjang: (a) pengembangan <i>food estate</i> untuk ketahanan pangan, khususnya wilayah timur Indonesia. Program <i>food estate</i> tersebut sebaiknya juga memperhatikan kondisi iklim setempat dan kearifan lokal warga sekitar untuk meminimumkan potensi konflik sosial; dan (b) meningkatkan peran BUMN serta BUMD dalam menjaga ketahanan pangan (sinergi antara Badan Pangan Nasional, Food ID, dan BUMD).
4.	Ketenaga-kerjaan, Kependudukan, dan Kesehatan	<p>Prioritas Kebijakan berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Pengeluaran: kebijakan PEN difokuskan untuk menjangkau kelompok pendapatan menengah bawah dan rendah; ii. Status Tenaga Kerja: kebijakan PEN fokus untuk menjangkau pekerja di sektor informal (akomodasi, makanan dan minuman, transportasi pergudangan, perdagangan); iii. Gender: kebijakan PEN menjangkau perempuan (penyedia akomodasi, makanan dan minuman); iv. Pendidikan, fokus pada: sektor berpendidikan rendah (konstruksi - lulusan SD, dan fasilitas pendidikan kepada kelompok pendapatan menengah bawah dan rendah); dan v. Kesehatan: kebijakan PEN fokus kepada pemulihan kesehatan secara menyeluruh dan berkelanjutan serta dukungan fasilitas kesehatan bagi kelompok pendapatan menengah bawah dan rendah.

5.	Infrastruktur	<p>Pembangunan infrastruktur kritikal pemulihan ekonomi nasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Vaksin sebagai game changer; ii. Sarana-prasarana kesehatan (RS, puskesmas); iii. Infrastruktur ketahanan pangan (termasuk irigasi, bendungan, cetak sawah baru); iv. Infrastruktur telekomunikasi (termasuk internet gratis/bersubsidi); v. Infrastruktur fisik; vi. Infrastruktur energi (listrik dan gas); vii. Infrastruktur pendukung pola hidup bersih sehat; dan viii. Soft infrastructure kesehatan (JKN dan teknologi kesehatan berbasis digital).
6.	UMKM	<ul style="list-style-type: none"> i. Penguatan pembiayaan dan adopsi digital (subsidi bunga KUR, kualitas produk, digitalisasi proses keuangan termasuk pembayaran termasuk dengan QRIS, kemudahan perizinan, insentif fiskal, akses pasar, akses bahan baku, penguatan ekosistem); dan ii. Penguatan pendataan dan skoring UMKM agar dapat melancarkan berbagai program bantuan untuk UMKM iii. memperkuat kemitraan yang lebih adil antara UMKM dengan <i>e-commerce</i>.

7.	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> i. MICE: pelaksanaan MICE pemerintah dan internasional terjadwal, fasilitas bidding MICE internasional; proses perizinan terintegrasi di daerah, termasuk pengawasan penerapan protokol kesehatan; ii. Penanganan scarring effects pariwisata: relokasi tenaga kerja pendukung keahlian baru, relokasi modal dan dukungan investasi, peningkatan inklusi dan literasi digital; iii. Korporasi: restruktur strategi bisnis, struktur keuangan, manajemen; iv. Perbankan: penyaluran kredit ke sektor prioritas dan kredit modal kerja untuk ekspansi bisnis; dan v. Pemerintah: memulihkan sektor pariwisata yang masih lesu (penghapusan syarat antigen dan PCR bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN)).
8.	Ekonomi-Keuangan Syariah	<ul style="list-style-type: none"> i. Pilar I - Pemberdayaan Ekonomi Syariah: penguatan 5 (lima) sektor unggulan - industri makanan halal, halal fesyen, pariwisata halal, pertanian, <i>renewable energy</i>; ii. Pilar II - Pendalaman Pasar Keuangan Syariah: mengoptimalkan <i>Islamic social finance</i> baik keuangan komersial syariah & ZISWAF; dan iii. Pilar III - Penguatan Riset, Asesmen, dan Edukasi: berbagai bentuk program edukasi dan sosialisasi untuk literasi syariah.
9.	Sumber Daya Kemaritiman	<ul style="list-style-type: none"> i. Pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim (termasuk simplifikasi proses bisnis, integrasi sistem layanan logistik, mempermudah pembayaran); ii. Wisata bahari berbasis potensi lokal; dan iii. Pengembangan sumber daya perikanan, rumput laut, dan air laut.

10.	Industri Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> i. Quick wins: pendekatan komunikatif dan populis atas HAKI (sosialisasi pendaftaran HAKI produk/karya kreatif, seminar manajemen SDM); dan ii. Medium terms: pelaksanaan asistensi dan penguatan <i>milestone</i> ekonomi kreatif nasional (termasuk stimulus).
11.	Akses Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> i. Pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit khususnya UMKM; ii. Perluasan akses pembiayaan UMKM melalui Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM); iii. Pengembangan KUR; iv. Penggunaan platform digital untuk pembiayaan dan pembayaran; dan v. Pengembangan database profil UMKM.
12.	Perdagangan dan Keuangan Internasional	<ul style="list-style-type: none"> i. Pengurangan hambatan perdagangan (tarif non-tarif); ii. Pemanfaatan teknologi modernisasi perdagangan; dan iii. Percepatan penyelesaian ratifikasi <i>Free Trade Agreement (FTA)</i>.

Kelompok Ketiga, Rekomendasi untuk mengakselerasi digitalisasi dan kebijakan hijau untuk inklusi ekonomi dan keuangan. Pada area digitalisasi, penguatan kebijakan mencakup area sebagai berikut. **Pertama, dalam jangka pendek**, Pemerintah perlu melakukan beberapa hal berikut : (i) menyusun Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Digital yang akan berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan orkestrasi, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan digital ke depan, sehingga dapat melengkapi strategi keuangan digital seperti Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 dari Bank Indonesia dan kebijakan ekonomi digital lainnya; (ii) membentuk Komite Nasional dan *Project Management Office (PMO)* Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Digital, yang memiliki tujuan untuk mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan digital

yang inklusif, terkoneksi, dan berkelanjutan. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui: pengembangan dan perluasan infrastruktur, penyediaan SDM digital yang mumpuni, stimulasi riset inovasi dan pengembangan usaha, penciptaan iklim usaha (termasuk tata kelola data), penguatan investasi dan pembiayaan, serta penguatan koordinasi lintas-sektor, K/L, dan swasta.

Kedua, pada jangka panjang, penguatan kebijakan/inisiatif/program yang perlu dijalankan pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi dan keuangan digital nasional adalah implementasi dan monitoring PMO Pengembangan Ekonomi Digital. Implementasi dan monitoring sebagai solusi medium terms ini perlu fokus pada: (i) infrastruktur; (2) SDM; (3) riset, inovasi, dan pengembangan usaha; (4) iklim usaha yang kondusif (termasuk tata kelola data); dan (5) pendanaan serta investasi. Rekomendasi penguatan kebijakan ini didasarkan pada tantangan pembangunan ekonomi dan keuangan digital Indonesia, yang meliputi: belum memadainya infrastruktur digital nasional (terdapat 12 ribu desa yang belum tersentuh internet), kapasitas SDM yang belum memadai (pada 2015-2030 Indonesia masih membutuhkan 9 juta talenta digital atau 600 ribu per tahun), regulasi yang belum kondusif (masih lemahnya keamanan siber, perlindungan data, dan banjirnya produk impor), serta *mindset* yang masih tertinggal.

Pada konteks pengembangan UMKM *go digital*, rekomendasi penguatan kebijakan termasuk: pelaksanaan literasi digital secara lebih masif dan kontinu terutama kepada *local champion* di daerah, pemberian subsidi biaya logistik untuk mendorong UMKM masuk ke pasar digital dan mampu bersaing dengan perusahaan besar, dan peningkatan penggunaan *e-catalog* UMKM dalam pengadaan. Sementara itu, rekomendasi penguatan kebijakan perlindungan konsumen di era digital termasuk edukasi dan sosialisasi yang masif melalui berbagai kanal media komunikasi untuk menjangkau kebutuhan informasi masyarakat (misalnya pinjol yang memiliki bunga dan biaya sangat tinggi), tersedianya kelengkapan petunjuk teknis atas implementasi kegiatan di pusat dan daerah, dan penciptaan *omnichannel* untuk kemudahan akses terhadap penyelesaian

pengaduan konsumen mulai generasi lanjut sampai dengan generasi z. Terkait kebijakan ekonomi-keuangan hijau, terdapat empat usulan langkah yang perlu menjadi pertimbangan bersama. Pertama, Pemerintah sebaiknya membuat kebijakan percepatan penerapan ekonomi hijau. Percepatan ini ditujukan untuk segera menyelamatkan lingkungan dan perubahan iklim yang dapat mengganggu perekonomian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perubahan iklim turut memengaruhi hasil panen yang pada akhirnya berdampak pada kestabilan harga pangan dalam jangka pendek. Sementara itu, kerusakan alam akibat perubahan iklim dapat menghalangi pencapaian pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang merupakan prasyarat bagi transformasi Indonesia menjadi ekonomi yang maju.

Kedua, perlunya mendorong upaya dekarbonisasi melalui penguatan kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang sudah berjalan. Kebijakan ini dapat menjadi *backbone* strategi pemulihan yang akan mengantarkan Indonesia menuju Ekonomi Hijau. Melalui PRK, *trade-off* antara pembangunan ekonomi dan isu-isu lingkungan yang terkait dengan dampak perubahan iklim dapat diminimalkan. Indikator keberhasilan PRK yaitu Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (Emisi Gas Rumah Kaca yang dihasilkan per satuan *output* ekonomi) diharapkan turun secara bertahap melalui proses transisi energi dari berbasis fosil ke energi bersih (energi baru terbarukan), peningkatan efisiensi energi, dan penggunaan kendaraan listrik secara lebih luas.

Ketiga, Pemerintah perlu terus mendorong transisi energi melalui peralihan dari energi fosil ke Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Hal ini sebagai langkah menuju persiapan industri hijau yang kompetitif dan berdaya saing di masa depan. Saat ini, Pemerintah telah menetapkan target penggunaan EBT mencapai 23% dari energi primer pada tahun 2025. Dengan target tersebut, diharapkan pengurangan emisi karbon bisa mencapai 29-41% berdasarkan target *Nationally Determined Contribution* (NDC) pada 2030 dan *net zero emission* (NZE) pada 2060 atau lebih cepat dengan dukungan internasional.

Keempat, perlunya untuk mendorong investasi dan pembiayaan hijau di Indonesia. Saat ini, tren investasi hijau berbasis *Environmental, Social and Governance (ESG)* di pasar modal Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan. Minat portofolio investasi hijau semakin meningkat di Indonesia sejalan dengan penerbitan POJK No. 51 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, yang mengidentifikasi 11 jenis portofolio hijau yang perlu dilaporkan oleh sektor keuangan. Apabila taksonomi hijau diperkuat dan diharmonisasi dengan instrumen hukum serupa, maka potensi investasi hijau akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kegiatan usaha yang berhasil mendapat label hijau. Taksonomi hijau merupakan klasifikasi atas aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.



ABSTRAK ARTIKEL PEMENANG
CALL FOR PAPERS



 **GLOBALISASI DAN TANTANGANNYA** 

**SCRUTINIZING THE FOREIGN DIRECT INVESTMENT
SPILLOVERS MODEL:
DO FOREIGN FIRMS MOTIVATE LOCAL FIRMS TO EXPORT?**

Mohammad Zeqi Yasin
University of Jember
m.zeqi.yasin@unej.ac.id

Rudi Purwono
Universitas Airlangga

Abstract

We aim to examine whether the presence of foreign direct investment (FDI), such as multinational companies (MNCs), motivates local firms to export (extensive model) and enhance their export intensity (intensive model). By employing the foods and beverages subsectors from Statistik Indonesia for the years of 2008-2015 and the Heckman Selection model, we capture a robust finding of positive spillovers following the FDI presence for both extensive and intensive models, concluding that domestic firms are motivated to export and enlarge their export intensity as inward MNCs in Indonesia. We also found persistence of export, indicating that firms exporting in prior year will be more likely to be exporter in the following year. Other variables, i.e. wages, import penetration, productivity, capital, firm size, and the dummy of foreign firms, support the firm's decision to export, even though not all of them encourage export intensity. This finding lead to the policy implication, namely regarding the priority in the Making Indonesia 4.0 of the foods and beverages industries that require substantial supports from the governments, notably in terms of human capital development to amplify the spillovers process.

Keywords: Foods and Beverages Industries, Export Spillovers, Indonesia.
JEL Classification: C33, F23, F43, O33

MODEL *HYBRID* DALAM PENENTUAN NILAI TUKAR RUPIAH: PENDEKATAN MIKROSTRUKTUR DAN MAKROEKONOMI

Fitri Handayani

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan
fhandayani@bps.go.id

Abstrak

Ketidakstabilan nilai tukar menjadi salah satu penghambat percepatan pemulihan ekonomi. Untuk menjaga stabilitas tersebut, diperlukan langkah tepat terkait model yang dapat menjelaskan pergerakan nilai tukar. Penelitian ini bertujuan untuk menggunakan model *hybrid*, yang merupakan kombinasi pendekatan mikrostruktur dan makroekonomi, dalam menganalisis pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Periode yang digunakan adalah Januari 2014 hingga Desember 20121. Metode ARDL digunakan untuk mendukung analisis dalam melihat keterkaitan jangka panjang dan jangka pendek. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat hubungan jangka panjang dan jangka pendek model *hybrid* terhadap pergerakan nilai tukar. Variabel mikrostruktur, yang menggunakan *spread* dan *high-low spread*, juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjelaskan nilai tukar. Di sisi lain, dalam jangka panjang, model makroekonomi yang terdiri dari jumlah uang beredar, aset luar negeri neto, dan suku bunga tidak berpengaruh signifikan. Hanya tingkat harga yang dapat menjelaskan pergerakan nilai tukar secara signifikan. Dengan keterlibatan variabel mikrostruktur, model *hybrid* dapat digunakan untuk menutup gap diskoneksi hubungan makroekonomi dalam menjelaskan nilai tukar.

Kata Kunci: model *hybrid*; model makroekonomi; mikrostruktur; nilai tukar; ARDL

Kode Klasifikasi JEL: F3; G2; E4; F4

Abstract

Exchange rate instability is one of the obstacles to accelerating economic recovery. For maintaining this stability, appropriate steps are needed regarding models that can explain exchange rate movements. This study aims to use a hybrid model, a combination of microstructure and macroeconomic approaches, to analyze the rupiah movement against the US dollar. The period used is January 2014 to December 2021. The ARDL method is used to analyze long-term and short-term relationships. The results obtained indicate that there is a long-term and short-term relationship between the hybrid model and the movement of the exchange rate. Microstructure variables, which use spreads and high-low spreads, also significantly influence exchange rates. On the other hand, in the long run, macroeconomic model consisting of the money supply, net foreign assets, and interest rates have no significant effect. Only the price level can explain exchange rate movements that are statistically significant. With the involvement of microstructural variables, the hybrid model can be used to close the gap in the disconnection of macroeconomic relationships in explaining the exchange rate

Keywords: hybrid model; macroeconomic model; microstructural variables; exchange rate; ARDL.

SHOULD INDONESIA IMPORTS CHICKEN FROM BRAZIL?

Catur Sugiyanto
Universitas Gadjah Mada
catur@ugm.ac.id.

Pepti Maya
CBS Office Mataram
pepti@bps.go.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak penghapusan hambatan non-tarif impor daging ayam dari Brazil terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penghapusan ini merupakan konsekuensi dari keputusan WTO bagi Indonesia untuk membuka pasar daging ayam dari Brazil. Data yang digunakan merupakan kombinasi dari seri data 2011-2018 dengan data cross section 33 provinsi di Indonesia. Analisis data panel digunakan untuk mengestimasi fungsi permintaan, penawaran, dan transmisi harga, sedangkan *Partial Equilibrium Analysis* digunakan untuk memperkirakan dampak kebijakan terhadap kesejahteraan. Simulasi kebijakan dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode perubahan jumlah impor dan metode *price gap*. Impor daging asal Brazil meskipun merugikan peternak, namun bermanfaat bagi konsumen, sehingga secara total dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: *non-tariff barriers; chicken meat; demand estimate; bid estimate; estimated price transmission; well-being; panel data; partial equilibrium.*

JEL Classification: D3, Q17, C3

Abstract

This study aims to examine the impact of removing non-tariff barriers to importing chicken meat from Brazil on the welfare of the Indonesian people. This elimination is a consequence of WTO's decision for Indonesia to open up the market for chicken meat from Brazil. Analysis based on panel data and partial equilibrium models. The data used is a combination of data series from 2011 to 2018 with cross section data of 33 provinces in Indonesia. Panel data analysis is used to estimate the function of demand, supply, and price transmission, while a partial equilibrium analysis is used to estimate the impact of policies on welfare. The policy simulation is carried out using two methods, namely the method of changing the number of imports and the method of price-gap. The results of the analysis show that the removal of non-tariff barriers to imports of chicken meat from Brazil, although detrimental to breeders, is beneficial for consumers, so that in total it can improve the welfare of the Indonesian people.

Keywords: non-tariff barriers; chicken meat; demand estimate; bid estimate; estimated price transmission; well-being; panel data; partial equilibrium.

JEL Classification: D3, Q17, C3

TEKNOLOGI, PEREKONOMIAN, DAN INKLUSI KEUANGAN DALAM PEMULIHAN EKONOMI DARI PANDEMI DI JAWA-BALI

Dede Yoga Paramartha
Badan Pusat Statistik RI
paramartha.yoga@bps.go.id

Dewi Widyawati
Badan Pusat Statistik RI

Abstrak

Sudah waktunya Pulau Jawa dan Bali untuk pulih dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi yang melanda sejak tahun 2020. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi mengingat potensinya yang tinggi selama pandemi. Teknologi informasi juga mampu memberikan efek yang lebih luas kepada pengembangan human capital dan juga inklusi finansial. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga akan menciptakan peningkatan konsumsi dan juga pertumbuhan ekosistem teknologi yang akan berefek juga kepada penyerapan teknologi. Dengan kerangka ini dimungkinkan untuk dilakukan kajian simultanitas antara penyerapan teknologi dan juga pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil dari penelitian, didapatkan bahwa memang terdapat keterkaitan dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan juga penyerapan teknologi di Jawa-Bali. Walaupun demikian, perlu adanya kontrol dari penyerapan teknologi agar tidak menyebabkan ketimpangan semakin lebar. Inklusi finansial merupakan salah satu indikator yang dapat menjadi monitor terhadap penyerapan teknologi. Inklusi finansial juga memberikan efek yang positif kepada pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, ketiga indikator tersebut merupakan cikal bakal dari kerangka pertumbuhan ekonomi inklusif yang berbasis teknologi.

Kata Kunci : Penyerapan teknologi; Perekonomian Regional; Inklusi Finansial; Persamaan Simultan

Kode Klasifikasi JEL : B22, C30, O33

Abstract

It is time for the islands of Java and Bali to recover from the economic downturn due to the pandemic that has hit since 2020. One of the efforts that can be done is by utilizing information technology given its high potential during the pandemic. Information technology is also able to have a wider effect on the development of human capital and financial inclusion. On the other hand, economic growth will also create an increase in consumption and a growth in the technology ecosystem which will also influence technology absorption. With this framework, it is possible to study the simultaneity between technology absorption and economic growth. Based on the results of the study, it was found that there is indeed a two-way relationship between economic growth and technology absorption in Java-Bali. However, it is necessary to control the absorption of technology so as not to cause wider inequality. Financial inclusion is an indicator that can be used as a monitor for technology absorption. Financial inclusion also has a positive effect on economic growth. Thus, the three indicators are the forerunner of a technology-based inclusive economic growth framework.

Keywords : Technology adoption; Regional Economic; Financial Inclusion; Simultaneous Equation

FREIGHT SERVICE DEFICIT AND CHALLENGES OF THE SHIPPING INDUSTRY IN INDONESIA

Salman Samir

Universitas Hasanuddin
salmansamir@unhas.ac.id

Achmad Rifai

Bappenas

Rizky Utami

Universitas Hasanuddin

Abstract

The services trade balance, especially freight services experienced a prolonged deficit for a long time due to the dominance of foreign ships in the transportation of international cargo. This study aims to analyze the causes of the dominance of foreign ships in cargo transportation, as well as the challenges faced by the shipping industry in Indonesia. Using the desk study method and focus group discussions, we found that the low productivity of Indonesian ships made export-import activities inefficient. The Term of Delivery (ToD) also contributes to the underdevelopment of the Indonesian ship fleet. We also reveal the various challenges of the shipping industry in Indonesia, namely inadequate port infrastructure, low financial support from the banking sector, and the low competence of human resources in the shipping sector.

Keywords: Service trade balance;logistics;shipping industry;Indonesia

JEL Classification: F10;L90



MONETER, FINTECH DAN
DIGITAL ECONOMY



DETERMINAN WIRAUSAHA PEREMPUAN PENGGUNA TRANSAKSI DIGITAL SELAMA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Dien Amalina Nur Asrofi
Universitas Brawijaya

Devanto Shasta Pratomo
Universitas Brawijaya

Farah Wulandari Pangestuty
Universitas Brawijaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi wirausaha perempuan menggunakan transaksi digital untuk usaha bisnis mereka selama masa pandemic covid-19 di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data individu yang bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020. Sakernas adalah survei angkatan kerja yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tentang informasi sosial- demografis individu, pendidikan, dan pekerjaan. Model regresi logistic biner digunakan untuk menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable usia, berpendidikan perguruan tinggi, berpendidikan SMA/SMK, tinggal di perkotaan, memiliki pengalaman, dan pelatihan serta bidang usaha pada sector perdagangan berpengaruh positif terhadap kecenderungan perempuan wirausaha menggunakan transaksi digital. Sedangkan usia, berstatus kawin dan jumlah anggota rumah tangga berpengaruh negatif terhadap peluang wirausaha perempuan menggunakan transaksi digital. Dengan menggunakan transaksi digital diharapkan semakin memudahkan dan memperluas akses wirausaha perempuan dalam mempertahankan bisnis mereka khususnya selama masa pandemic Covid-19 di Indonesia.

Kata Kunci: Wirausaha Perempuan, Transaksi Digital, Sakernas.

Abstract

This study aims to examine the factors that influence women entrepreneurs to use digital transactions for their business ventures during the COVID-19 pandemic in Indonesia. The data used in this study is individual data sourced from the 2020 National Labor Force Survey (Sakernas). Sakernas is a labor force survey conducted by the Central Statistics Agency (BPS) on individual socio-demographic information, education, and employment. Binary logistic regression model was used to answer the research objectives. The results showed that the variables of age, college education, high school / vocational education, living in urban areas, having experience, and training and business fields in the trade sector had a positive effect on the tendency of women entrepreneurs to use digital transactions. Meanwhile, age, marital status and number of household members have a negative effect on the opportunities for women entrepreneurs to use digital transactions. By using digital transactions, it is hoped that it will further facilitate and expand the access of women entrepreneurs in maintaining their businesses, especially during the Covid-19 pandemic in Indonesia.

Keywords: women entrepreneur; digital transaction; sakernas

PENGARUH DIGITALISASI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA PEREMPUAN INDONESIA

Ifan Davani

Universitas Gadjah Mada
davaniifan@gmail.com

Eny Sulistyaningrum

Universitas Gadjah Mada

Abstrak

Era digitalisasi yang terus berkembang pesat belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan perempuan Indonesia, khususnya dalam pasar tenaga kerja. Partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia cenderung stagnan dan sulit meningkat selama satu dekade terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap penyerapan tenaga kerja perempuan Indonesia dengan menggunakan data sekunder publisitas resmi BPS dan BKKBN antarwaktu 2012-2020 melibatkan 33 provinsi dan analisis regresi data panel *fixed effect model*. Hasil menunjukkan bahwa digitalisasi berpengaruh positif dan signifikan sebesar 1,24 persen terhadap penyerapan tenaga kerja perempuan. Pemangku kebijakan diharapkan mengenalkan perempuan melek teknologi sedari awal dan memastikan perempuan mampu menggunakan hasil investasi pembangunan akses dan infrastruktur TIK sehingga mendorong penyerapan tenaga kerja perempuan Indonesia.

Kata Kunci: TIK; tenaga kerja perempuan

Kode klasifikasi JEL: J21; O30

Abstract

The era of digitalization that continues to develop rapidly has not been fully utilized by Indonesian females, especially in the labour market. Indonesian female's labor force participation has tended to stagnate and has been difficult to increase over the past decade. This study analyzes the effect of digitalization on the absorption of Indonesian female workers by using secondary data from the official publicity of BPS and BKKBN between 2012-2020 involving 33 provinces and fixed effect model panel data regression analysis. The results show that digitalization has positive and significant effect of 1,24 percent on the absorption of female workers. Policy makers are expected to introduce females to technology literacy from an early age and ensure that females are able to use the investments results in ICT access and infrastructure to encourage the absorption of Indonesian female workers.

Keywords: ICT; female worker

EFFICIENCY, PERFORMANCE AND POTENTIAL IMPROVEMENT OF INDONESIAN RURAL BANKS DURING COVID-19 PANDEMIC

Aam Slamet Rusydiana

Sharia Economic Applied Research and Training (SMART) Indonesia

Mimma Maripatul Uula

Institut Agama Islam Tazkia

Syahdatul Maulida

Institut Agama Islam Tazkia

Aufa

Institut Agama Islam Tazkia

Raihan Agra Dharana Kanz

Institut Agama Islam Tazkia

pepti@bps.go.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tingkat efisiensi, performa, dan potensi perbaikan BPR dan BPRS di Indonesia, terutama pada masa pandemi Covid-19 guna mewujudkan pemulihan ekonomi nasional. Sampel penelitian sebanyak 77 BPR dan 52 BPRS di Indonesia selama periode 2016-2020. Metode analisis yang digunakan pada adalah pendekatan non parametrik yaitu *Data Envelopment Analysis (DEA)*, dengan sumber data sekunder yang berasal dari laporan keuangan bank. Variabel input meliputi aset tetap, biaya operasional, dan dana pihak ketiga. Kemudian variabel output terdiri dari jumlah pembiayaan yang diberikan dan pendapatan operasional. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya tren yang fluktuatif pada BPR dan BPRS di Indonesia dari tahun ke tahun. Berdasarkan skor CRS dan VRS diketahui selama pandemi Covid-19 tingkat efisiensi BPR bergerak stabil dan BPRS mengalami penurunan efisiensi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efisiensi BPR di Indonesia lebih baik dibandingkan dengan efisiensi BPRS. Selain itu, berdasarkan analisis potensi peningkatan, diketahui bahwa sumber inefisiensi yang paling signifikan berasal dari variabel output yaitu pembiayaan yang diberikan dan pendapatan operasional. Lebih lanjut, berdasarkan analisis benchmarking kondisi efisiensi BPR dan BPRS tahun 2016-2019 lebih baik daripada efisiensi di tahun 2020, Penelitian ini juga memberikan rekomendasi kepada stakeholder (BPR dan BPRS), akademisi, dan regulator.

Kata Kunci: BPR; BPRS; Pandemi Covid-19; DEA; Indonesia

Kode Klasifikasi JEL: G2; R1

Abstract

This study aims to analyze the efficiency, performance, and potential for improvement of BPRs and BPRS in Indonesia, especially during the Covid-19 pandemic, to realize the national economic recovery. The research sample was 77 BPR and 52 BPRS in Indonesia during the 2016-2020 period. The analytical method used is a non-parametric approach, namely Data Envelopment Analysis (DEA), with secondary data sources derived from financial bank statements. Input variables include fixed assets, operational costs, and third-party funds. Then the output variable consists of the amount of financing provided and operating income. The results of this study indicate a fluctuating trend in BPR and BPRS in Indonesia from year to year. Based on the CRS and VRS scores, it is known that during the Covid-19 pandemic, the efficiency level of BPRs moved steadily, and BPRS experienced a decrease in efficiency. Therefore, this study concludes that the efficiency of BPR in Indonesia is better than that of BPRS. In addition, based on the analysis of the potential for improvement, it is known that the most significant source of inefficiency comes from the output variable: financing provided and operating income. Furthermore, based on the benchmarking analysis, the efficiency of BPR and BPRS in 2016-2019 is better than the efficiency in 2020. This study recommends stakeholders (BPR and BPRS), academics, and regulators.

Keywords: BPR; BPRS; Pandemi Covid-19; DEA; Indonesia

Kode Klasifikasi JEL: G2; R1

**THE STRENGTH OF THE SEEMINGLY UNRELATED REGRESSION
MODEL IN DETECTING ECONOMIC GROWTH AND POVERTY RATE
BASED ON FINANCIAL INCLUSION IN INDONESIA**

Lia Nazliana Nasution

Universitas Pembangunan Panca Budi
lianazliana@dosen.pancabudi.ac.id

Ade Novalina

Universitas Pembangunan Panca Budi

Budi Anshari Nasution

Bank Sumut

Abstract

Financial inclusion has become an essential topic in recent years. Its impact on economic growth, poverty alleviation, and reducing income inequality is evident in several countries. Indonesia as a developing country, where economic growth has slowed in recent years, the level of use of formal financial services still needs to be increased, and the decline in the poverty rate, which is not followed by a low Gini ratio, is necessary to study further how financial inclusion affects economic growth and poverty rate in Indonesia. Using the Seemingly Unrelated Regression (SUR) model, we wanted to investigate the model's strength to achieve the objectives of this study. The results of the SUR model show that financial inclusion does not positively impact economic growth. However, we find the dimensions of availability of financial inclusion optimal for poverty alleviation and reducing income inequality well with significant adverse results. Meanwhile, the dimensions of accessibility and usability have no significant effect.

DAMPAK SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI TERHADAP PEREKONOMIAN DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN INDONESIA

Muhammad Adisurya Pratama

Bank Indonesia Institute

muhammad.adisuryapr@gmail.com

Muhammad Handry Imansyah

Universitas Lambung Mangkurat

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah sistem pembayaran non tunai memberikan pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan stabilitas sistem keuangan Indonesia yang dilihat dari pertumbuhan M2. Metode *Vector Error Correction Model (VECM)* dan *Dynamic OLS (DOLS)* digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil empiris, kartu kredit dan uang elektronik memberikan efek signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kartu kredit dan sistem BI-RTGS juga memberikan efek signifikan terhadap inflasi dan stabilitas sistem keuangan dan hasilnya tetap konsisten dengan model DOLS.

Kata Kunci: sistem pembayaran non tunai; *impulse response functions*; *variance decomposition*

Kode Klasifikasi JEL: E42; E58

Abstract

This paper examines whether noncash payment systems emerge pivotal effect towards Indonesia's economic growth, inflation, and financial system stability, which is considered from M2 growth. Vector Error Correction Model (VECM) and Dynamic OLS (DOLS) methods are employed within this paper. Based on empirical results, this paper suggests that credit cards and electronic money promote significant effect to economic growth. Credit cards and BI-RTGS system also create significant effect toward inflation and financial system stability and the results are robust within DOLS model.

Keywords: noncash payment systems; impulse response function; variance decomposition;

JEL Classification Code: E42; E58



**FISKAL, *MULTIPLIER* DAN
*SUSTAINABILITY***



TOURISM MODEL IN INCREASING LOCAL OWN REVENUE : TERNATE CITY CASE STUDY

Prince Charles Heston Runtunuwu

Khairun University
princecharles@unkhair.ac.id

Nurdin Ardiansyah

Khairun University

Bakri Soamole

Khairun University

Abstract

To promote tourism in the city of Ternate is an inseparable part in the introduction of history, culture, customs and of course the beauty of nature. This attraction is a magnet for tourists , to visit Ternate . Apart from that, the government will also prepare basic facilities and infrastructure in tourist attractions. So that this will be an added value for the government in increasing the Regional Indigenous Income . This study aims to: 1) find out how big the contribution of income from the tourism sector is to Ternate City 's Native Revenue , especially those sourced from income from the management of the Sulamadaha Beach tourism object and Lake Tolire tourism object , 2) find out the implementation of strategies that carried out to increase Indigenous A - Regional Income from the tourism sector in Ternate City for the revenue contribution of the management of these two tourism objects and 3) knowing what factors are inhibiting and supporting the development of the tourism sector . This study uses several methods , including the percentage of visits, regression, distribution, polynomials, and SWOT analysis. To strengthen the strengths of weaknesses, opportunities and threats to make a strategy for strengthening tourism destinations in the city of Ternate.

Keywords : Attractiveness, Infrastructure, Local Own Revenue, SWOT

JEL Classification: D31; C30; I25; I28

**THE RELATIONSHIP OF ORGANIZING NATIONAL SPORTS
EVENTS TO LOCAL TAX REVENUE IN INDONESIA**

Susan Budiarto

Universitas Indonesia
susanbudiarto08@gmail.com

Riatu Mariatul Qibtiyyah

Universitas Indonesia
rqibthiyyah1@gmail.com

Abstract

The Indonesia National Sports Event, also called Pekan Olahraga Nasional (PON), is a quadrennial multi-sport event participated in by all provinces in Indonesia. The organizing of PON expects to encourage economic growth to increase local tax revenue for the host. Using data on the realization of local tax revenues from 105 districts and cities in the province of PON organizers in the period 2000 – 2020, this study aims to determine the impact of implementing PON 2000 East Java to PON 2016 West Java on overall local tax revenue and regional revenue per type of tax. This study uses an event study methodology, and the empirical test results show that PON affects total local tax revenue, restaurant tax, and entertainment tax in the short term, but has no impact on hotel and advertisement tax revenue.

Keywords: National Sports Event, economic growth, local tax revenue, event study, eventdd

JEL Classification: H71; L83

PENGARUH KARTU PRAKERJA DALAM MENCIPTAKAN WIRUSAHA BARU PADA GENERASI Y DAN Z

Tasmilah

Badan Pusat Statistik Kota Malang
tasmilah@bps.go.id

Abstrak

Pandemi berdampak pada peningkatan pengangguran dan penurunan penghasilan pada usaha di Indonesia. Untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mendorong penciptaan lapangan usaha baru pemerintah meluncurkan program pelatihan kartu pra kerja. Dengan menggunakan data Sakernas Agustus 2021, penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh kartu prakerja dalam menciptakan wirausaha baru dan meningkatkan pendapatan UMKM di Indonesia. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa pelatihan kartu pra kerja berpengaruh positif dalam penciptaan wirausaha pada generasi Z (umur 15-24 tahun), sedangkan pada generasi Y dan X tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Kartu prakerja hanya berpengaruh pada penciptaan wirausaha pada sektor jasa, adapun pada sektor pertanian dan manufaktur, kartu prakerja tidak memberikan pengaruh. Variabel migrasi, pelatihan, dan pengalaman juga berpengaruh positif dalam penciptaan wirausaha baru di Indonesia. Sedangkan variabel yang berpengaruh negatif dalam penciptaan wirausaha baru adalah pendidikan dan wilayah perkotaan. Pelatihan kartu prakerja dan variabel seperti penjualan daring melalui sosial media, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan pendapatan UMKM di Indonesia. Adapun variabel pendidikan memberikan pengaruh yang negatif.

Kata kunci: kartu prakerja, migrasi, modal manusia, wirausaha
JEL: J08, R23, E24, L26

Abstract

The pandemic has had an impact on increasing unemployment and decreasing income for businesses in Indonesia. To improve the skills of the workforce and encourage the creation of new business opportunities, the government launched a pre-employment card training program. Using Sakernas August 2021 data, this study aims to estimate the effect of the pre-employment card in creating new entrepreneurs and increasing the income of MSMEs in Indonesia. The results of logistik regression analysis show that pre-employment card training has a positive effect on the creation of entrepreneurs in generation Z (aged 15-24 years), while generations Y and X do not have a significant effect. The pre-employment card only affects the creation of entrepreneurs in the service sector, while in the agricultural and manufacturing sectors, the pre-employment card has no effect. The variabels of migration, training, and experience also have a positive effect on the creation of new entrepreneurs in Indonesia. While the variabels that have a negatif effect on the creation of new entrepreneurs are education and urban areas. Pre-employment card training and variabels such as online sales through social media, training, skills, and experience have a positive influence in increasing the income of MSMEs in Indonesia. The education variabel has a negatif influence.

Keywords: pre-employment card, entrepreneurship, human capital, migration
JEL: J08, L26, E24, R23

ANALISIS GREEN FINANCING DAN FAKTOR SPESIFIK BANK TERHADAP RISIKO PERBANKAN DI INDONESIA

Felix Alvin Hatmadi
Unika Atma Jaya Jakarta
fahatmadi99@gmail.com

Nuning Trihadmini
Unika Atma Jaya Jakarta
nuning.trihadmini@atmajaya.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi *Green Financing* dan faktor spesifik bank yaitu; *Credit Quality*, *Efisiensi Bank*, *Profitabilitas*, *Solvabilitas*, dan *Bank Size* terhadap Risiko Kredit pada perbankan di Indonesia, periode 2015-2019. *Green Financing* diukur dengan *Total Green Credit*, Efisiensi Bank diukur dengan BOPO, dan Profitabilitas diukur dengan *Return on Assets (ROA)*. Sampel penelitian ini adalah bank umum yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019 dan sudah melaksanakan sustainable banking. Dari 45 bank, terdapat 9 bank terpilih yang memenuhi kriteria dan dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini, dan analisis data dilakukan dengan menggunakan Data Panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *credit quality*, efisiensi bank dan solvabilitas berpengaruh terhadap Risiko Kredit, sedangkan *Green Financing*, profitabilitas dan bank size tidak berpengaruh terhadap risiko kredit.

Kata Kunci: *Green Financing*, *Credit Risk*, Pembangunan Berkelanjutan, Data Panel.

JEL Classification: 016

Abstract

This study aims to analyse the effect of the implementation of Green Financing and banking-specific factors such as credit quality, bank efficiency, profitability, solvency, and bank size on Credit Risk in Indonesian banking in the period 2015-2019. Green Financing is measured by the total green credit, bank efficiency is measured by BOPO, and profitability is measured by Return on Assets (ROA). The sample of this study are commercial banks that have been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2015-2019 and have implemented sustainable banking. Of the 45 banks, there are 9 selected banks that meet the criteria. The results showed that credit quality, bank efficiency and solvency had an effect on Credit Risk, while Green Financing, profitability and bank size had no effect on Credit Risk.

Keywords: Green Financing, Credit Risk, Sustainable Development, Panel Data.

JEL Classification: 016

DAMPAK MULTIPLIER SEKTOR UNGGULAN JATIM TERHADAP PROVINSI LAIN: PENDEKATAN IRIO

Dwi Wahyu Triscowati
BPS Kabupaten Banyuwangi
trisco@bps.go.id

Taupikurrahman
BPS Provinsi NTB

Abstrak

Jawa Timur memegang peranan penting dalam pemulihan perekonomian Indonesia pasca guncangan Covid-19. Hal ini dikarenakan kontribusi PDRB maupun ekspor migas Jawa Timur terbesar kedua. Provinsi ini juga merupakan pintu penghubung ke berbagai provinsi di Indonesia. Oleh karena itu perlu dipetakan sektor-sektor unggulan di Jawa Timur yang mampu memacu pemulihan ekonomi serta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel IRIO Jawa Timur dan tabel IRIO Indonesia 2016 yang dirilis oleh BPS. Analisis dilakukan dengan analisis deskriptif, analisis keterkaitan, analisis sektor unggulan melalui koefisien penyebaran dan kepekaan penyebaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa enam unggulan industri di Provinsi Jawa Timur adalah (1) Ketenagalistrikan, (2) Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional, (3) Jasa Perusahaan, (4) Jasa Informasi dan Komunikasi, (5) Industri Makanan dan Minuman, serta (6) Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman. Kenaikan pada beberapa industri tersebut dapat mendorong lebih cepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Adapaun perubahan ekonomi di Jawa Timur sangat berdampak pada output provinsi Banten, NTB, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Bali, dan NTT. Disisi lain perubahan output provinsi lain yang memberikan pengaruh terbesar terhadap perubahan output provinsi Jawa Timur adalah perubahan output di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah.

Kata Kunci: input output, analisis keterkaitan, analisis sektor unggulan



PRODUKTIFITAS DAN DAYA SAING



**FOR POOR HOUSEHOLDS, SOCIAL CAPITAL
IS IMPORTANT TO DEAL WITH DISASTERS**

Thomas Soseco
Universitas Negeri Malang
thomas.oseco.fe@um.ac.id

Isnawati Hidayah
ROTASI Institute

Nila Cahayati
ROTASI Institute

Fajar Try Leksono
ROTASI Institute

Abstract

As Indonesia is prone to natural disasters, households need the ability to maintain the standard of living by enhancing social capital in the community. This paper examines the impact of natural disasters on a household's standard of living measured from food expenditure when social capital exists. Data is obtained from the Indonesian Family Life Survey (IFLS) 2014 and is analysed by using a regression model and quantile regression. Our findings show natural disasters give a higher impact on poor households than on nonpoor. When social capital exists, it can help households to maintain their standard of living, as observed by food expenditures. Policies should be focused to increase the household standard of living so households have a financial buffer to deal with financial shocks like natural disasters. Besides, enhancing social participation at the poor and the lowest administration level is required to create a stronger social capital.

Keywords: food expenditure, social capital, natural disasters

JEL Classification: D10, I31, Q54

GEN Z DAN TRANSISI PEKERJA *BLUE-COLLAR*: TANTANGAN DALAM PEMULIHAN EKONOMI

FX Gugus Febri Putranto

Universitas Brawijaya

gugusfebri@bps.go.id

Christiayu Natalia

Badan Pusat Statistik Kota Malang

Abstrak

Fenomena bonus demografi dapat menjadi peluang percepatan pemulihan ekonomi Indonesia di era normal baru. Namun, pemuda Gen Z sebagai bagian dari angkatan kerja yang merupakan *digital native*, menghadapi berbagai masalah ketenagakerjaan saat pandemi. Pemuda Gen Z yang bekerja pada jabatan *blue-collar* mengalami syok yang kuat di tengah pandemi, dengan bertransisi menjadi pengangguran bahkan keluar dari pasar tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk melihat determinan transisi pemuda Gen Z *blue-collar* dalam pasar tenaga kerja, secara umum di Indonesia serta spesifik menurut tingkat keterampilan. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) dengan amatan individu panel dari tahun 2019 hingga 2020 dianalisis menggunakan metode regresi logistik multinomial. Faktor demografi dan *human capital* merupakan isu penting dalam transisi pemuda Gen Z menjadi pengangguran atau bukan angkatan kerja. Menjaga inklusivitas dalam pemulihan ekonomi dapat menjadi alternatif solusi bagi Gen Z. Selain itu, meningkatkan dan memperdalam keahlian bagi para pekerja *blue-collar* Gen Z, perlu untuk dilakukan secara intensif untuk mendorong pemulihan ekonomi.

Kata Kunci: pekerja *blue-collar*, gen Z, bonus demografi, logistik multinomial, sakernas

Kode Klasifikasi JEL: J82, J24, J2

Abstract

Demographic bonus phenomena can be an opportunity to accelerate Indonesia's economic recovery in new normal era. However, Gen Z youth as part of the workforce who are digital natives, face various employment problems during the pandemic. Gen Z youth who work in blue-collar positions are experiencing intense shock during the pandemic, transitioning to unemployment and even exiting the labour market. This study aims to examine the determinants of the transition of blue-collar Gen Z youth in the Indonesian labour market, in whole model and specifically according to skill level. Data from the National Labour Force Survey (SAKERNAS) with individual panel observations from 2019 to 2020 were analysed using the multinomial logistic regression method. Demographic factors and human capital are important issues in the transition of Gen Z youth to become unemployed or exit from labour market. Maintaining inclusiveness in economic recovery can be an alternative solution for Gen Z. In addition, improving and deepening the skills of Gen Z blue-collar workers, needs to be done intensively to encourage economic recovery.

Keywords: blue-collar worker, gen Z, demographic bonus, multinomial logistic, sakernas

BONUS DEMOGRAFI, MODAL MANUSIA, DIGITALISASI, DAN KESEJAHTERAAN: SEBUAH KAJIAN EMPIRIS

Nadya Setiawati

Universitas Padjadjaran
nadya19007@unpad.ac.id

Iqram Ramadhan Jamil

Universitas Padjadjaran
qram19001@unpad.ac.id

Abstrak

Dominasi penduduk usia kerja dalam struktur demografi merupakan peluang dalam meningkatkan kesejahteraan. Saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami fenomena transisi tersebut atau disebut sebagai dividen demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif sangat mendominasi keseluruhan populasi. Optimalisasi dividen demografi menjadi isu yang penting karena kemajuan pesat dari era digital saat ini membuat teknologi informasi menyentuh hampir setiap aspek perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transisi demografi, modal manusia dan digitalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Penelitian ini menggunakan panel data dengan observasi yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2015 – 2019. Model *Twostep System Generalized Method of Moment (GMM)* diterapkan dalam penelitian ini. Hasil estimasi menunjukkan bahwa aspek dividen demografi yang diproksikan oleh rasio ketergantungan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan pada kedua model. Selain itu, aspek digitalisasi dan modal manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan layanan digital dan pendidikan guna mengoptimalkan manfaat dari potensi dividen demografi.

Kata Kunci: Ekonomi Pembangunan; Modal Manusia; Pertumbuhan Penduduk

JEL: F63; J24; Q56

Abstract

The dominance of the working-age population in the demographic structure is an opportunity to improve welfare. Currently, Indonesia is one of the countries experiencing this transition phenomenon or what is known as the demographic dividend, where the number of productive age population dominates the entire population. Optimizing demographic dividends is an important issue because the rapid progress of the current digital era has made information technology touch almost every aspect of the economy. This study aims to analyze the effect of demographic transition, human capital and digitalization on economic growth and poverty levels. This study uses panel data with observations from 34 provinces in Indonesia from 2015 – 2019. The Two-step System Generalized Method of Moment (GMM) model is applied in this study. The estimation results show that the demographic dividend aspect, which is proxied by the dependency ratio does not show a significant effect on both models. In addition, aspects of digitalization and human capital have a positive effect on economic growth and poverty reduction. Therefore, the government needs to improve digital services and education to optimize the benefits of the potential demographic dividend.

Keywords: Development Economics; Human Capital; Population Growth

YOUTH NEET IN EAST JAVA AMIDST THE COVID-19 PANDEMIC

Yefin Amandri Meidika

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi
yefin@bps.go.id

Yusi Krismaningtyas

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik
yusikrisma@bps.go.id

Taly Purwa

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
taly@bps.go.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak pandemi Covid-19 terhadap penduduk usia muda yang tidak terlibat dalam aktivitas bekerja, bersekolah, maupun mengikuti training (NEET) di Jawa Timur dan empat wilayah, yaitu Madura, Mataraman, Padalungan, dan Arek. Analisis regresi logistik diterapkan pada data mikro hasil SAKERNAS Agustus 2019-2021 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada level provinsi pandemi Covid-19 tahun 2020 memberikan dampak negatif terhadap NEET. Sementara pada Era New Normal tahun 2021, kecenderungan pemuda menjadi NEET justru mengalami penurunan, bahkan lebih rendah dibandingkan saat sebelum pandemi. Dilihat menurut wilayah, pola dampak yang sama dirasakan di Wilayah Mataraman. Bahkan dampak negatif masih terasa di Wilayah Arek pada Era New Normal. Namun dampak tersebut tidak terlihat di Wilayah Madura dan Padalungan. Variabel jenis kelamin dan interaksinya dengan kategori umur serta tingkat pendidikan pemuda menunjukkan pola kecenderungan yang berbeda antar wilayah. Sedangkan variabel lainnya, yakni klasifikasi daerah tempat tinggal, kategori umur, status perkawinan, kegiatan dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga, memiliki pola kecenderungan yang sama pada seluruh wilayah. Hasil tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan prioritas pada program penurunan angka NEET di Jawa Timur.

Kata Kunci: NEET, Pandemi Covid-19, Pengangguran Muda, Prakerja

Kode Klasifikasi JEL: C5, J1, J21

Abstract

This study aims to examine the impact of Covid-19 pandemic on young people who are not involved in work, school, or training activities (NEET) in East Java by regions, namely Madura, Mataraman, Padalungan, and Arek. Logistic regression analysis was performed on microdata from SAKERNAS August 2019-2021. The results showing that at the provincial level the Covid-19 pandemic in 2020 had a negative impact on NEET. Meanwhile, in the New Normal Era in 2021, the odds of youth becoming NEET decreased, even lower than before the pandemic. By region, the same pattern of impact is depicted in the Mataraman Region. Even the negative impact still appears in Arek Region in the New Normal Era. However, this impact was not seen in the Madura and Padalungan Regions. The variable of gender and its interaction with the age category and the education level of the youth show a different impact pattern between regions. While other variables, i.e the residence, age, marital status, activities, and education level of the household head, have the same impact pattern in all regions. These results are expected to support the government to determine priorities for the NEET reduction program in East Java.

Keyword : Covid-19, NEET, Pre-employment Card, Youth Unemployment

AGEING POPULATION DAN DETERMINAN KEPUTUSAN BEKERJA PENDUDUK LANJUT USIA DI INDONESIA

Ida Ayu Wayan Regita Iswari Puri

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi

iswari.puri@bps.go.id

A.A. Ngurah Gede Wasudewa

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Abstrak

Fenomena yang akan dihadapi Indonesia pasca berakhirnya momen bonus demografi adalah fase ageing population. Pada fase ini, proporsi penduduk tidak produktif dibandingkan penduduk usia produktif berpotensi meningkatkan angka rasio ketergantungan di Indonesia. Salah satu upaya untuk meminimalisir dampak negatif tersebut adalah dengan mengoptimalkan partisipasi penduduk lansia dalam dunia kerja. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi fenomena ageing population dan variabel determinan dari keputusan bekerja penduduk lansia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 5 provinsi yang memiliki proporsi penduduk lansia tinggi namun minim dalam partisipasi kerja. Status tempat tinggal, status dalam rumah tangga, status perkawinan, jenis kelamin, tingkat pendidikan, akses internet, kondisi kesehatan, serta akses terhadap jaminan kesehatan berpengaruh terhadap keputusan lansia untuk tetap bekerja. Diantara seluruh variabel tersebut kondisi kesehatan/gangguan fungsional adalah variabel yang paling signifikan mempengaruhi kecenderungan lansia untuk bekerja. Kedepannya agar partisipasi kerja penduduk lansia makin tinggi maka perbaikan terhadap infrastruktur pendidikan, kesehatan dan layanan internet di suatu wilayah sangat diperlukan.

Kata kunci: *ageing population*; bonus demografi; pekerja lansia; regresi logistik

Kode Klasifikasi JEL: J11; J14; J21; J24

Abstract

The phenomenon at the end of the Indonesia's demographic bonus phase is ageing population. In this phase, the proportion unproductive population to productive population is likely to increase Indonesia's dependency ratio. An attempt to minimize the negative impacts is to optimize the participation of elderly workforce. Hence, this study aims to identify the phenomenon of the ageing population and the determinant variable of the decision to work for the elderly population. The results indicate that there are 5 provinces that have a high proportion of the elderly population but slightest in workforce participation. Residence status, status in the household, marital status, gender, education level, internet access, health conditions, and access to health insurance affect the elderly determine to work. Amongst all the variables, health condition/functional disorder has the biggest significance on the tendency of the elderly to work. Henceforward, in order to increase the workforce participation of the elderly population, improvement of the education infrastructure, health and internet services is indispensable.

Keywords: ageing population; demographic bonus; elderly worker; logistic regression



FOTO-FOTO













IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA

Jl. Daksa 4 No. 9, Jakarta 12120

Phone : (021) 2277 2577

Fax : (021) 720 1812

Email : isei.pusat@gmail.com

www.isei.or.id